

2019



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KABUPATEN SUMENEP**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan kepada Presiden Republik Indonesia yang disesuaikan dengan sistematika penyusunan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan dimaksud, memiliki dua fungsi yaitu :

- Pertama** : Disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan urusan serta sumber daya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- Kedua** : Merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai jaminan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat serta sebagai informasi mengenai Penerapan Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 terhadap Rencana Kerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

Disamping itu, dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, tentu tidak lepas adanya kerja sama para *stakeholders* dan komitmen pihak yang terkait, yaitu Tim Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ini dapat menjadi media evaluasi kinerja serta

pengukuran peningkatan kinerja dalam pelayanan publik bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan, serta diharapkan upaya perbaikan bersama secara berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sumenep **“SUPER MANTAP”**. Keterkaitan dalam kerangka menjaga konsistensi dan sinergitas antara Visi dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dengan Nawacita Bapak Presiden RI termasuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, sertadengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 31 Maret 2020
BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep	2
1. Kondisi Umum Geografis	2
2. Topografi	5
3. Penggunaan Lahan	6
4. Kondisi Demografi.....	7
D. Perangkat Daerah.....	10
1. Struktur Organisasi.....	10
2. Komposisi ASN	12
E. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	14
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	15
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	16
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	16
4. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	17
5. Peningkatan dan Pengelolaan Tata Ruang dan Perumahan	18
6. Pengendalian Lingkungan Hidup.....	19
7. Peningkatan Peran Serta Sektor Pertanian	19
8. Peningkatan Peran Serta Sektor Koperaasi dan UMKM	20
9. Peningkatan Ketahanan Pangan.....	21
10. Pelestarian Budaya Yang Berwawasan Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24

1. Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021	24
2. Tujuan dan Sasaran	25
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	29
D. Perjanjian Kinerja	29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **33**

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019	34
B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2019	37
1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	38
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	39
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	40
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	41
5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai.....	44
6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	45
7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan..	48
8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	49
9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	51
10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.....	52
11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	53
12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	54
13. Meningkatnya Daya Tarik Investor.....	55
14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.....	55
15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	56
16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.....	57
17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.....	58
18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	59

19. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	60
20. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	61
21. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	61
C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	62
1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	62
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.....	63
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	63
4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	64
5. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai.....	65
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan	66
7. Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan..	67
8. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	67
9. Meningkatkan Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	70
10. Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.....	70
11. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	71
12. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata	71
13. Meningkatkan Daya Tarik Investor	72
14. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.....	73
15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	73
16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.....	73
17. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.....	76
18. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	76
19. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	77
20. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	77

21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	78
D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	79
1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	79
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	80
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	81
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	82
5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai.....	83
6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	84
7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan..	85
8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	85
9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	88
10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.....	89
11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	90
12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	90
13. Meningkatnya Daya Tarik Investor	91
14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	92
15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	92
16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.....	93
17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.....	96
18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	97
19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak.....	97
20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	98
21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	98
CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN AKHIR RPJMD	99

E.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	104
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	104
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	102
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	105
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	105
5.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai.....	106
6.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	107
7.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan..	108
8.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	108
9.	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	109
10.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.....	110
11.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	110
12.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	111
13.	Meningkatnya Daya Tarik Investor	112
14.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	112
15.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	113
16.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.....	113
17.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.....	114
18.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	115
19.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	116
20.	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	116
21.	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	117
F.	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	118
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	118

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	118
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	118
4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	119
5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai.....	119
6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	119
7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan..	120
8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	120
9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	120
10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.....	120
11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	121
12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	121
13. Meningkatnya Daya Tarik Investor.....	121
14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.....	121
15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	121
16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah.....	122
17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial.....	123
18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	123
19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	123
20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	124
21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	124
BAB IV PENUTUP	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karakteristik dan kondisi Wilayah Kabupaten Sumenep	3
Tabel 1.2	Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep	4
Tabel 1.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Sumenep	6
Tabel 1.4	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep	8
Tabel 1.5	Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2018	
Tabel 1.6	Perkembangan Keadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Sumenep Berdasarkan golongan, Pendidikan, Eselon, Jenis Kelamin Tahun 2010 s/d 2019	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016 – 2021	26
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	30
Tabel 3.1	Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2019.....	34
Tabel 3.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Atas Dasar Tema Pembangunan Tahun 2019.....	37
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.....	37
Tabel 3.4	Realisasi Sasaran 1 Tahun 2019	39
Tabel 3.5	Realisasi Sasaran 2 Tahun 2019	39
Tabel 3.6	Realisasi Sasaran 3 Tahun 2019	40
Tabel 3.7	Realisasi Sasaran 4 Tahun 2019	41
Tabel 3.8	Realisasi Sasaran 5 Tahun 2019	44
Tabel 3.9	Realisasi Sasaran 6 Tahun 2019	46
Tabel 3.10	Realisasi Sasaran 7 Tahun 2019	48
Tabel 3.11	Realisasi Sasaran 8 Tahun 2019	49
Tabel 3.12	Realisasi Sasaran 9 Tahun 2019	51
Tabel 3.13	Realisasi Sasaran 10 Tahun 2019	52
Tabel 3.14	Realisasi Sasaran 11 Tahun 2019	53
Tabel 3.15	Realisasi Sasaran 12 Tahun 2019	54
Tabel 3.16	Realisasi Sasaran 13 Tahun 2019	55
Tabel 3.17	Realisasi Sasaran 14 Tahun 2019	56

Tabel 3.18	Realisasi Sasaran 15 Tahun 2019	56
Tabel 3.19	Realisasi Sasaran 16 Tahun 2019	58
Tabel 3.20	Realisasi Sasaran 17 Tahun 2019	59
Tabel 3.21	Realisasi Sasaran 18 Tahun 2019	60
Tabel 3.22	Realisasi Sasaran 19 Tahun 2019	60
Tabel 3.23	Realisasi Sasaran 20 Tahun 2019	61
Tabel 3.24	Realisasi Sasaran 21 Tahun 2019	62
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.26	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.28	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Tahun Sebelumnya	64
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Tahun Sebelumnya	65
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Tahun Sebelumnya	66
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Tahun Sebelumnya	67
Tabel 3.32	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Tahun Sebelumnya	67
Tabel 3.33	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Tahun Sebelumnya	70
Tabel 3.34	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Tahun Sebelumnya	70
Tabel 3.35	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Tahun Sebelumnya	71
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Tahun Sebelumnya	71
Tabel 3.37	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Tahun Sebelumnya	72
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Tahun Sebelumnya	73
Tabel 3.39	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Tahun Sebelumnya	73
Tabel 3.40	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Tahun Sebelumnya	73

Tabel 3.41	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Tahun Sebelumnya	76
Tabel 3.42	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Tahun Sebelumnya	76
Tabel 3.43	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Tahun Sebelumnya	77
Tabel 3.44	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Tahun Sebelumnya	77
Tabel 3.45	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Tahun Sebelumnya	78
Tabel 3.46	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Berdasarkan IKU Tahun 2019	78
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Akhir Periode RPJMD	79
Tabel 3.48	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Akhir Periode RPJMD	80
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Akhir Periode RPJMD	81
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Akhir Periode RPJMD	82
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Akhir Periode RPJMD	83
Tabel 3.52	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Akhir Periode RPJMD	84
Tabel 3.53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Akhir Periode RPJMD	85
Tabel 3.54	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Akhir Periode RPJMD	85
Tabel 3.55	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Akhir Periode RPJMD	88
Tabel 3.56	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Akhir Periode RPJMD	89
Tabel 3.57	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Akhir Periode RPJMD	90
Tabel 3.58	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Akhir Periode RPJMD	90
Tabel 3.59	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Akhir Periode RPJMD	91
Tabel 3.60	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Akhir Periode RPJMD	92

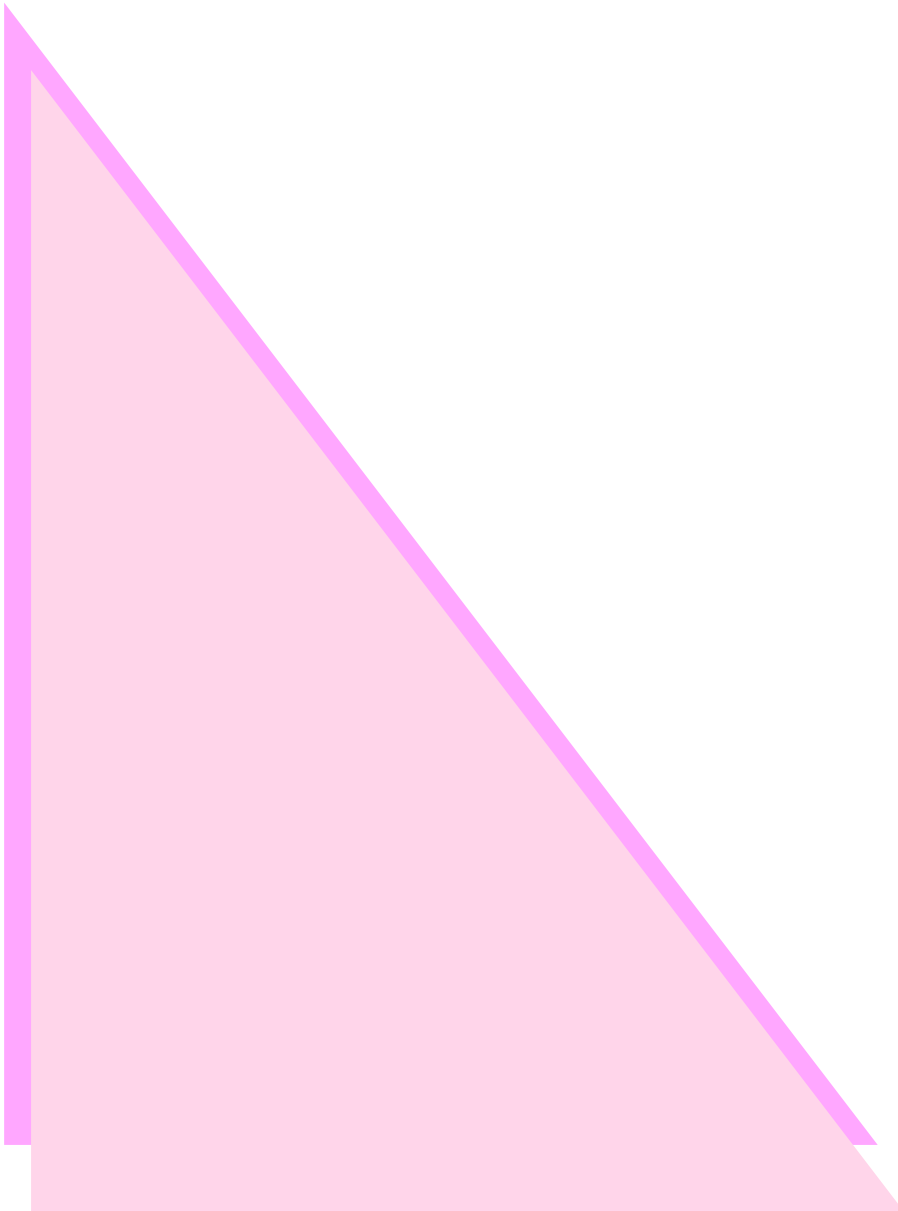
Tabel 3.61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Akhir Periode RPJMD	92
Tabel 3.62	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Akhir Periode RPJMD	93
Tabel 3.63	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Akhir Periode RPJMD	96
Tabel 3.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Akhir Periode RPJMD	97
Tabel 3.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Akhir Periode RPJMD	97
Tabel 3.66	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Akhir Periode RPJMD	98
Tabel 3.67	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Akhir Periode RPJMD	98
Tabel 3.68	Capaian Indikator Kinerja Tujuan/Makro Tahun 2019 Terhadap Akhir Periode RPJMD	99
Tabel 3.69	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	104
Tabel 3.70	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	104
Tabel 3.71	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3	105
Tabel 3.72	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4	106
Tabel 3.73	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5	107
Tabel 3.74	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6	107
Tabel 3.75	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7	108
Tabel 3.76	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8	109
Tabel 3.77	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9	109
Tabel 3.78	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10.....	110
Tabel 3.79	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 11.....	110
Tabel 3.80	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 12.....	111

Tabel 3.81	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 13.....	112
Tabel 3.82	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 14.....	112
Tabel 3.83	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 15.....	113
Tabel 3.84	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 16.....	114
Tabel 3.85	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 17.....	115
Tabel 3.86	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 18.....	115
Tabel 3.87	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 19.....	116
Tabel 3.88	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 20.....	117
Tabel 3.89	Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 21.....	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep.... 3





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas publik menjadi tanggung jawab Pemerintah **karena merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan dalam** rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan jawaban yang berisi penjelasan mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media informasi untuk mengetahui sejauh mana peran Penyelenggara Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya di era otonomi daerah terhadap rencana dan kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam program kegiatan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam merespon setiap kebijakan baru Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, sistematika penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada prinsipnya penyusunan laporan ini untuk memberikan ulasan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditargetkan dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.



2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 63 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019.
3. Perjanjian Kinerja (Perkin) Bupati Sumenep tahun 2019.
4. Pengukuran/indikator kinerja merupakan bagian dari perencanaan yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan baik tujuan maupun sasaran.
5. Pelaporan kinerja atau yang disebut dengan LKJIP menyajikan realisasi kinerja baik tahun yang berkenaan maupun perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya serta capaian terhadap akhir RPJMD yang disertai dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan program pendukung kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Kabupaten Sumenep Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang..

C. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

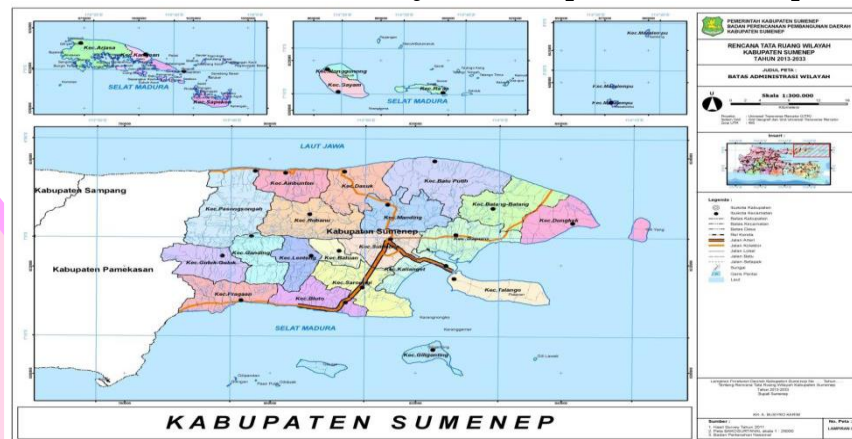
1. Kondisi Umum Geografis

Kondisi dan karakteristik suatu wilayah sangat mempengaruhi didalam sistem dan kebijakan pembangunan daerah dimana setiap kebijakan dan sistem pembangunan yang diterapkan akan mengalami perubahan dalam masyarakat mulai dari perubahan pola ruang wilayah sampai pada perubahan sosial budaya masyarakat itu sendiri.



Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep merupakan wilayah mempunyai luas wilayah Lautan sebesar + 50.000 Km² dimana didalamnya juga terdapat pulau – pulau. Posisi koordinat Kabupaten Sumenep terletak pada 113032'54" - 116016'48" Bujur Timur dan diantara 4055'-7024' Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep



Sumber : RT RW Kabupaten Sumenep 2013-2033

Tabel 1.1
Karakteristik dan kondisi Wilayah Kabupaten Sumenep

Uraian	Keterangan
Luas Wilayah	2.093,457573 Km²
- Bagian Daratan	1.146,927065 Km ²
- Bagian Kepulauan	946,530508 Km ²
Luas Lautan	+ 50.000 Km²
Jumlah Kecamatan	27 Kecamatan
- Kecamatan Daratan	18 Kecamatan
- Kecamatan Kepulauan	9
Jumlah Desa	330
- Desa Daratan	244
- Desa Kepulauan	86
Jumlah Kelurahan	4
Batas Wilayah :	
- Sebelah Utara	Laut Jawa
- Sebelah Selatan	Selat Madura
- Sebelah Timur	Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat	Kabupaten Pamekasan
Jumlah Pulau	126



Uraian	Keterangan
- Pulau Berpenghuni	48
- Pulau Tidak Berpenghuni	78

Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua bagian wilayah yang terdiri dari :

- 1) Bagian Daratan dengan luas wilayah 1.146,93 Km² (54,79%) terbagi atas 18 (delapan belas) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto, Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten.
- 2) Bagian Kepulauan dengan luas wilayah 946,54 Km² (45,21%) terbagi atas 9 (sembilan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Giligenting.

Selain itu Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 27 Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan wilayah daratan, 1.774 Rukun Warga (RW) sedangkan 5.569 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan gugus kepulauan-kepulauan di Kabupaten Sumenep, Pulau yang terjauh/Utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

Berdasarkan gambaran administratif wilayah Kabupaten Sumenep pada tabel berikut disajikan data jumlah desa dan luas kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,1
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27



No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)
		Desa/Kel.	Dusun	
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,5
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,4
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,9
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
JUMLAH		334	1.547	2.093,47

Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2018

Berdasarkan gugus kepulauan, Kabupaten Sumenep memiliki 126 Pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 Pulau) maupun tidak berpenghuni (78 Pulau), pulau yang terjauh di sebelah utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau Sulawesi).

2. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Sumenep pada umumnya tergolong daerah daratan rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya. Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500



meter diatas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan laut, sehingga ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.
- 2) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,47 Km² (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara lain:

- 1) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 0-30% luasnya sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%.
- 2) Wilayah yang memiliki kemiringan antara 30-60% luasnya sekitar 437,39 Ha atau 21,02%, kawasan ini dapat dijumpai pada kawasan perbukitan.
- 3) Sedangkan luas wilayah yang memiliki kemiringan > 60% berupa area pegunungan dengan luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48%.

3. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Sumenep seluas 209.347 Ha terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas penggunaan lahan terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan Kabupaten Sumenep

No.	Penggunaan	Luas	Persentase
		(Ha)	(%)
I	Lahan Pertanian	169.660,00	80,78
a.	Lahan Sawah	35.819,00	21,11
	1. Irigasi teknis	4.596,10	2,71



No.	Penggunaan	Luas	Persentase
		(Ha)	(%)
	2. Irigasi setengah teknis	1.819,50	1,07
	3. Irigasi sederhana	2.121,40	1,25
	4. Irigasi Desa	173,00	0,10
	5. Irigasi Tadah Hujan	27.109,00	15,98
b.	Lahan pertanian bukan sawah	133.841,00	78,89
	1. Tegal/kebun	107.724,00	63,49
	2. Ladang/Huma	2.388,00	1,41
	3. Sementara Tidak diusahakan	5.058,00	2,98
	4. Lainnya	18.671,00	11,00
II	Lahan Bukan Pertanian (Rumah, bangunan dan hal sekitarnya, hutan Negara, Rawa-rawa, lainnya)	40.359,00	19,22
	TOTAL	210.019,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep, 2019

Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Sumenep didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah berupa tegal/kebun/ladang seluas 133.841,00 Ha dan kemudian disusul dengan lahan bukan pertanian berupa permukiman, hutan negara, rawa dan rumah bangunan seluas 40.359 Ha. Dari kondisi tersebut bahwa rata-rata penggunaan lahan pada wilayah ini sebagian besar belum terkelola dengan baik dimana tegalan dan ladang terlihat masih mendominasi dikarenakan untuk pemanfaatan lahan tersebut tergantung pada ketersediaan air atau masih tergantung pada kondisi musim tertentu.

Kawasan Lindung di Kabupaten Sumenep terdiri atas (1) Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Pulau Kangean Kecamatan Arjasa; (2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebar di Kabupaten Sumenep; (3) Kawasan Perlindungan Setempat; dan (4) Kawasan Sempadan Sungai.

Kawasan budidaya terdiri atas (1) Kawasan peruntukan hutan produksi tersebar di Pulau Kangean, Pulau Paliat, Pulau Sepanjang dan wilayah daratan Kabupaten Sumenep; (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar di Kecamatan Dasuk, Batuputih, Guluk-Guluk, rubaru, Gapura, Saronggi, Pragaan Gayam dan Nonggunong; (3) Kawasan Pertanian; (4) Kawasan Perkebunan di Rubaru, Ganding, Lenteng; (5) kawasan perikanan berada di Pasongsongan, Bluto, Saronggi, Dungkek, Batang-Batang, dan Kangean, (6) Kawasan Pertambangan Galian C di daerah



Pasongsongan, Batuputih, Dasuk, dan Batang-Batang; (7) Kawasan Industri tersebar di Kabupaten Sumenep sesuai dengan potensi masing-masing wilayah; (8) Kawasan Pariwisata tersebar di Kabupaten Sumenep baik wisata budaya maupun wisata bahari.

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sebanyak 1.132.194 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 550.164 jiwa (48,59%) dan perempuan 582.030 jiwa (51,40%). Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Sumenep menurut kecamatan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 1.4
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	KOTA SUMENEP	Panaongan	78.942	27,84	2.851
2	KALIANGET	Kalianget Timur	44.207	30,19	1.461
3	MANDING	Manding Laok	30.951	68,88	451
4	TALANGO	Talango	39.516	50,27	797
5	BLUTO	Bungbungan	49.010	51,25	954
6	SARONGGI	Tanamerah	38.572	67,71	565
7	LENTENG	Ellak Laok	64.295	71,41	900
8	GILIGENTING	Aenganyar	24.423	30,32	809
9	GULUK GULUK	Guluk-guluk	51.291	59,57	866
10	GANDING	Ketawang	37.670	53,97	698
11	PRAGAAN	Pragaan Laok	67.355	57,84	1.160
12	AMBUNTEN	Ambunten Timur	41.492	50,54	820
13	PASONGSONGAN	Panaongan	51.917	119,03	439
14	DASUK	Kerta Timur	30.997	64,5	479
15	RUBARU	Rubaru	41.018	84,46	487
16	BATANG BATANG	Batang-batang	55.906	80,36	694
17	BATUPUTIH	Batuputih Laok	44.711	112,31	398
18	DUNGKEK	Dungkek	36.265	63,35	570
19	GAPURA	Gapura Barat	38.932	65,78	591



No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
20	GAYAM	Pancor	33.086	88,4	374
21	NONGGUNONG	Sokarame	13.727	40,08	342
22	RAAS	Brakas	35.100	38,9	900
23	MASALEMBU	Sukajeruk	23.489	40,85	566
24	ARJASA	Kalikatak	76.108	241,99	311
25	SAPEKEN	Sapeken	48.324	201,89	237
26	BATUAN	Batuan	13.504	27,1	496
27	KANGAYAN	Kangayan	22.947	204,68	111
JUMLAH			1.133.755	2.093	542

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumenep, DKB Semester I 2019

Kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan salah satunya sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka diperlukan perhatian yang semakin besar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Kepadatan penduduk yang berbeda-beda ini bisa menimbulkan permasalahan kependudukan antara lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 semester I mencapai **1.133.755** jiwa. **Tingkat Kepadatan Penduduk** rata-rata **542** jiwa/km² dari luas wilayah sebesar **2.093,47** km².

Tabel 1.5
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep
Tahun 2014-2018

URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Luas Wilayah	km ²	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47	2.093,47
Jumlah Penduduk :							
- B P S	jiwa	1.067.202	1.072.113	1.123.310	1.123.310	1.085.227	1.088.910
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.103.419	1.104.264	1.114.949	1.126.724	1.132.194	1.133.755
Pertumbuhan penduduk:							
- B P S	%	0,56	0,46	0,48	0,48	0,37	0,34



URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Dispenduk & Capil	%	0,13	0,08	0,97	0,99	0,48	0,14
Kepadatan penduduk :							
- BPS	jiwa/km2	510	512	514	514	518,39	520,15
- Dispenduk & Capil	jiwa/km2	526	527	536	538	541	542

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, 2019

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.088.910 jiwa, terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 3.683 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 sebesar 0,34% dengan persentase atau laju pertumbuhan penduduk menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,48% sehingga mengalami penurunan sebesar 0,04%.

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 sebesar 0,14% dan pada tahun 2018 sebesar 0,48% dengan demikian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,34%.

D. PERANGKAT DAERAH

1. Struktur Organisasi

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Dinas Daerah, terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;



2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
8. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
10. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tipe B menyelenggarakan urusan Perumahan Rakyat dan permukiman, sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Peternakan;



16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- f. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
- g. Kecamatan (ada 27 Kecamatan) : Kota Sumenep, Batuan, Kalianget, Manding, Talango, Bluto, Saronggi, Lenteng, Giligenting, Guluk-Guluk, Ganding, Pragaan, Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang,



Batuputih, Dungkek, Gapura, Gayam, Nonggunong, Ra'as, Masalembu, Arjasa, Kangayan, Sapeken.

- h. Khusus kecamatan Kota Sumenep membawahi 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Bangselok, Pajagalan, Kepanjin, Karangduak merupakan perangkat kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat

2. Komposisi ASN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Dengan SIMPEG dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang lebih tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Manfaat dari SIMPEG ini diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang akurat dan cepat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan.

Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sejumlah **8.999** (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) orang, dan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan, dapat dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Golongan IV, sebanyak : 2.472 orang
 - 2) Golongan III, sebanyak : 4.405 orang
 - 3) Golongan II, sebanyak : 1.980 orang
 - 4) Golongan I, sebanyak : 142 orang



2. Menurut tingkat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) S3, sebanyak : 2 orang
- 2) S2, sebanyak : 497 orang
- 3) S1, sebanyak : 4.768 orang
- 4) Diploma III, sebanyak : 1.025 orang
- 5) Diploma II, sebanyak : 440 orang
- 6) Diploma I, sebanyak : 21 orang
- 7) SMA, sebanyak : 2.022 orang
- 8) SMP, sebanyak : 102 orang
- 9) SD, sebanyak : 122 orang

3. Menurut eselon dapat dikelompokkan ke dalam:

- 10) Eselon II, sebanyak : 32 orang
- 11) Eselon III, sebanyak : 202 orang
- 12) Eselon IV, sebanyak : 683 orang
- 13) Non Eselon, sebanyak : 2.503 orang
- 14) Fungsional : 5.597 orang

Tabel 1.6
Perkembangan Keadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kab Sumenep
Berdasarkan golongan, Pendidikan, Eselon, Jenis Kelamin
Tahun 2010 s/d 2019

URAIAN	SATUAN	TAHUN								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Golongan										
Golongan I	Orang	374	261	309	287	236	190	180	165	142
Golongan II	Orang	3.516	3.479	3.312	3.204	3.005	2.570	2.539	2.230	1.980
Golongan III	Orang	4.766	4.545	4.451	4.493	4.511	4.577	4.143	4.113	4.405
Golongan IV	Orang	3.302	3.282	3.108	3.157	3.091	3.116	2.793	2.633	2.472
Jumlah	Orang	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141	8.999
Pendidikan										
S-3	Orang	1	1	1	1	-	-	-	1	2
S-2	Orang	307	298	311	326	334	342	295	527	497
S-1	Orang	3.379	3.350	3.309	3.463	3.486	4.008	3.481	4.553	4.768
D-III	Orang	835	815	793	852	847	818	1.020	966	1.025
D-II	Orang	2.492	2.394	2.321	2.216	2.041	1.521	1.411	505	440



URAIAN	SATUAN	TAHUN								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D-I	Orang	122	115	119	83	79	59	59	30	21
SLTA	Orang	4.017	3.839	3.657	3.575	3.469	3.161	2.903	2.285	2.022
SLTP	Orang	440	440	367	320	294	275	242	121	102
SD	Orang	365	315	302	305	293	269	244	153	122
Jumlah	Orang	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141	8.999
Eselon										
Eselon II	Orang	32	32	34	33	36	35	35	33	32
Eselon III	Orang	194	199	207	206	206	188	192	203	202
Eselon IV	Orang	932	928	957	955	986	921	889	659	683
Eselon V	Orang	38	39	42	42	42	39	-	-	-
Fungsional	Orang	7.076	6.882	6.853	6.853	6.569	6.348	5.524	5.597	5.579
Staf PNS	Orang	3.686	3.487	3.087	3.052	3.004	2.922	3.015	2.649	2.503
Jumlah	Orang	11.958	11.567	11.180	11.141	10.843	10.453	9.655	9.141	8.999

E. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep seperti telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis mengenai pembangunan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat merupakan salah satu kunci untuk menunjang pembangunan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang relatif terbatas, dan sistem pendidikan yang belum berkembang optimal dan merata di berbagai daerah, menyebabkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sumenep menjadi lemah di tengah iklim persaingan



yang semakin ketat. Pemerataan pendidikan di wilayah daratan dan kepulauan harus terus dioptimalkan. Penyediaan fasilitas sekolah dan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, pembangunan pendidikan juga harus menyiapkan lulusan-lulusan kompetitif yang memiliki kompetensi dan keterampilan sehingga memiliki daya saing tinggi tidak hanya secara lokal tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional.

Percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia guna menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan serta pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya yang mampu bersaing ditingkat regional, nasional bahkan dunia internasional dengan program prioritas yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Peningkatan dan pemerataan pendidikan sebagai indikator pembangunan manusia;
- b. Revitalisasi SMK yang mendukung potensi daerah;
- c. Pengembangan sekolah kawasan bermutu;
- d. Peningkatan kesejahteraan dan status pendidik;
- e. Peningkatan kompetensi pendidik dan pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep termasuk di wilayah kepulauan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia produktif. Jaminan kesehatan bagi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau baik dari segi sarana dan prasarana, tenaga kesehatan yang profesional dan pemerataan layanan kesehatan. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, permasalahan yang dihadapi antara lain, belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep selama 4 tahun terakhir ini terus mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebanyak 3.06 per



1000 kelahiran hidup, tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0.85 yaitu sebesar 2.21 per 1000 kelahiran hidup. Data AKB terus mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 2.21 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2019 sebesar 1.94 per 1000 kelahiran hidup. Pengembangan puskesmas, polindes dan poskesdes berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, sosialisasi tentang sanitasi dan air bersih, peningkatan pelayanan kesehatan dan program puskesmas gratis, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui adanya BPJS Kesehatan dapat menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Sumenep.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang tinggi mengindikasikan kesejahteraan masyarakat rendah. Kemiskinan berkaitan pula dengan tingkat pengangguran. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup. Kedua isu tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kurangnya pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2019 jumlah data penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 211.980 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan dukungan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya jangka pendek. Lebih daripada itu, pengentasan kemiskinan harus pula berorientasi jangka panjang melalui pemberian pelatihan, keterampilan-keterampilan sebagai modal dasar bagi



masyarakat untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melibatkan partisipasi rakyat juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam penurunan jumlah kemiskinan adalah kurangnya sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, belum adanya pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat by name-by adress, kurangnya pemahaman dan identifikasi mendalam terhadap permasalahan kemiskinan.

4. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang berlimpah termasuk potensi migas, sumber daya laut, potensi di sektor pertanian yang besar, dan pariwisata. Aksesibilitas yang mudah dan memadai merupakan faktor pendukung agar sumber daya alam yang dihasilkan dapat tersalurkan secara merata ke seluruh masyarakat di berbagai wilayah terutama dalam upaya memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan dan keamanan infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Akses infrastruktur turut serta dalam upaya mempercepat peningkatan perekonomian terutama Kabupaten Sumenep yang wilayahnya tidak hanya mencakup daratan tetapi juga memiliki banyak pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Sumenep menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut: belum optimalnya tingkat kemantapan dan kualitas jalan, kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, serta terbatasnya fasilitas lalu lintas. Adapun langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pembangunan infrastruktur kota dan desa;
- b. Pengelolaan tata ruang secara terpadu;
- c. Perbaikan jalan dan irigasi menuju fokus prioritas wajib dan unggulan perhubungan;



- d. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi lokal dan masterplan transportasi.

Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor.

5. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang dan Perumahan

Suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan didukung oleh perkembangan sektor-sektor lain yang cukup potensial dan strategis. Pertumbuhan dan perkembangan ini tentu saja akan memberikan konsekuensi logis, terutama dalam pemekaran kawasan. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan memberi perubahan terhadap struktur dan pola ruang yang ada. Di sisi lain, perkembangan tersebut dapat berjalan cepat atau lambat, semuanya tergantung dari potensi sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumberdaya tersebut dikelola.

Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Pengembangan perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendaliannya pada kawasan strategi. Namun perkembangan dan pertumbuhan kawasan yang terjadi dapat merubah struktur dan pola ruang dan perlu dicermati. Apalagi perubahan tersebut menjadi sangat signifikan dan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman penataan ruang yang berlandaskan hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033. Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6. Pengendalian Lingkungan Hidup

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Sumenep dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Isu strategis pada urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global.

7. Peningkatan peran serta sektor Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu potensi ekonomi strategis yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumenep. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 39 %. Pertanian masih dominan dipilih oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya. Upaya yang dapat dilakukan guna mengembangkan sektor pertanian adalah melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, juga senantiasa diupayakan diversifikasi komoditi pertanian serta revitalisasi pengolahan hasil pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil olahan produk pertanian.

8. Peningkatan peran serta sektor Koperasi dan UMKM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) juga menjadi penopang perekonomian daerah. Kelompok usaha ini menjadi katup pengaman pada saat bangsa ini dalam keadaan krisis ekonomi. Sektor UMKM merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. KUMKM juga menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang paling banyak sehingga berperan besar dalam mengatasi problem kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan koperasi dan UMKM saat ini perlu terus dioptimalkan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga berpengaruh besar terhadap masyarakat. Upaya pengembangan UMKM kedepan diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (UMKM) lebih kuat dengan memiliki kemampuan usaha yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



(IPTEK) dan berdaya saing. Adapun untuk mewujudkan misi pemerataan pembangunan dan berkeadilan, upaya pemberdayaan diarahkan kepada usaha skala mikro dan kecil, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya, para pelaku ekonomi di kelompok usaha ini. Peningkatan kompetensi melalui perkuatan kewirausahaan dan produktivitas. Adapun untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, akan ditempuh kebijakan meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Langkah strategis yang dapat ditempuh guna mengembangkan UMKM antara lain :

- a. Membangun kerjasama yang bersifat kemitraan dengan lembaga yang mempunyai perhatian khusus terhadap peningkatan Usaha Kecil Menengah yang berbasis kemandirian;
- b. Membangun kinerja profesional dan manajemen modern terhadap pengelolaan usaha kecil menengah di Kabupaten Sumenep;
- c. Membangun perbaikan kualitas barang dan efisiensi, dan sesuai dengan selera masyarakat yang selalu dinamis;
- d. Membangun kerjasama dengan pihak bank dan bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman permodalan.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Sumenep walaupun secara kuantitatif mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koperasi pada tahun 2017 sebanyak 1.244 koperasi, meningkat menjadi 1.265 pada tahun 2018 dan di tahun 2019 menjadi 1.284 koperasi. Kalau kita lihat lebih lanjut, bahwa jumlah koperasi tidak aktif pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mempunyai jumlah yang sama yaitu sebanyak 320 unit. Berdasarkan data di atas, dapat kita interpresentasikan bahwa koperasi di Kabupaten Sumenep masih kurang dari aspek kelembagaan. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan manajemen koperasi diantaranya melalui bimbingan teknis pengurus koperasi. Selain itu perlu peningkatan pemahaman masyarakat sebagai anggota koperasi tentang pentingnya koperasi. Sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian rakyat.



9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan pangan akan semakin banyak. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan, alih fungsi lahan, adanya perubahan iklim global yang berpengaruh pada ketersediaan dan distribusi pangan, kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap ketahanan pangan, kurang optimalnya diversifikasi pangan, ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi, keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan, belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan, dan belum optimalnya peran kelembagaan petani. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan ketahanan pangan antara lain :

- a. Pemberdayaan buruh tani, buruh industri kecil dan, buruh nelayan;
- b. Pengembangan pola kemitraan usaha tani yang menguntungkan dan berkeadilan;
- c. Pengembangan pertanian berorientasi agribisnis dan ketahanan pangan serta menjaga tersedianya pupuk bagi petani;
- d. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan utama antara lain, padi, jagung, kedelai, daging dan telur;
- e. Pengembangan sumber pangan alternatif;
- f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi pangan;
- g. Peningkatan akses distribusi pangan di wilayah kepulauan;
- h. Pencapaian Pola Pangan Harapan;
- i. Peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat.

10. Pelestarian Budaya yang Berwawasan Kearifan Lokal sebagai upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah

Sektor yang juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta sebagai Kabupaten paling timur di Pulau Madura kaya akan budaya dan daerah wisata, maka Kabupaten Sumenep perlu mengembangkan pembangunan kepariwisataan yang dapat memberikan manfaat



bagi masyarakat. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor nonmigas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Memasuki era globalisasi pengaruh budaya global banyak mewarnai pada kehidupan, sementara itu kebudayaan global tersebut tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kultur kita yang bernuansa kearifan lokal. Hal ini terjadi pada berbagai aspek baik arsitek bangunan, adat istiadat, seni budaya maupun benda-benda bersejarah, sehingga tanpa kita sadari nilai-nilai budaya Kabupaten Sumenep yang berwawasan kearifan lokal menjadi terkikis.

Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Berbagai bidang pembangunan membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Kebudayaan dari sisi peningkatan kesejahteraan lahir bisa dikembangkan dalam rangka mendukung pariwisata yang berujung pada dampak ekonomi kepada masyarakat. Selain itu pula dengan munculnya industri kreatif yang berbasis budaya lokal juga mendorong usaha kecil masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.



**BAB
II**

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan kinerja atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah:

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”



Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.***
2. Misi Kedua, ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.***
3. Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.***
4. Misi Keempat, ***Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.***
5. Misi Kelima, ***Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.***
6. Misi Keenam, ***Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.***

2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembangunan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel : 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016 - 2021

Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis,
Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Mantap	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah 2 Angka Harapan Lama Sekolah	
			2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	
			3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Angka Kemiskinan 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3 Penurunan Masalah Sosial	
2 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan	1 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan Dan Wilayah Kepulauan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	1 Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik 2 Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik 3 Indeks Kinerja Irigasi 4 Persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan : - Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan - Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	
			2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 Persentase RT yg akses air bersih 3 Persentase penurunan luas area kumuh 4 Rasio elektrifikasi	
			1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan vegetasi (Meningkatnya Kelestarian Lingkungan)	1 Indeks kualitas air sungai 2 Indeks kualitas udara 3 Indeks tutupan lahan / vegetasi	
			2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks kualitas air sungai 2 Indeks kualitas udara 3 Indeks tutupan lahan / vegetasi
			1 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 Persentase RT yg akses air bersih 3 Persentase penurunan luas area kumuh 4 Rasio elektrifikasi



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3 Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	1 Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	1 Nilai Tukar Nelayan 2 Nilai Tukar Petani
			2 Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan	1 Produksi tanaman pangan dan hortikultura 2 Produksi hasil perkebunan 3 Produksi hasil peternakan 4 Produksi hasil perikanan
			3. Meningkatkan Penganeka ragam Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			4 Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	1 Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah 2 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 3 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian
			5 Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	1 Persentase Koperasi Sehat 2 Persentase pertumbuhan UMKM
			6 Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata	1 Persentase kunjungan pariwisata 2 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
			7 Meningkatkan Daya Tarik Investasi	1 Jumlah Investor 2 Jumlah nilai investasi
			8 Meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah	1 Persentase PAD terhadap APBD
4 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel	Nilai SKM	1 Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja PEMDA	1 Nilai SAKIP 2 Opini BPK 3 Peringkat LPPD
			2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	1 Nilai SKM Unit-unit layanan publik 2 E- Government



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
5 Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan	1	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa	1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	1 Persentase BUMDes yang sehat 2 Persentase desa mandiri 3 Persentase desa tertinggal
	2	Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat	1 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)
			2 Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Indeks Pemberdayaan Gender 2 Kabupaten layak anak
	6 Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	1	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Dilandasi Dengan Semangat Nasionalisme Dan Kearifan Lokal	1 Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama
2 Meningkatkan Pelestarian Nilai-nilai Seni dan Budaya				2 Indeks Pelestarian seni dan budaya

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja sasaran yang menjadi prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Meningkatkan kualitas Infrastruktur	1 Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
	2 Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
	3 Indeks Kinerja Irigasi
	4 Persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan : - Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan - Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1	Produksi tanaman pangan dan hortikultura
		2	Produksi hasil perkebunan
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
4	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	1	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai program, hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan disebut RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah. Rencana Kinerja Tahun 2018 yang ditetapkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 63 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Sasaran, Indikator serta IKU, dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 adalah, sebagai berikut :



Tabel : 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1.1.1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1.1.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,4 tahun	
		1.1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,27 tahun	
1.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,14 tahun	
1.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1.1.3.1. Angka Kemiskinan	19,53 %	
		1.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,95 %	
		1.1.3.3. Penurunan Masalah Sosial	0,45 %	
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur				
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2.1.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,41 %	IKU
		2.1.1.2. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,11 %	IKU
		2.1.1.3. Indeks Kinerja Irigasi	70,00 %	IKU
		2.1.1.4. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :		IKU
	a. Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	309.673 Orang		
	b. Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	32 Menit		
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.2.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	
		2.1.2.2. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	89%	
		2.1.2.3. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%	
		2.1.2.4. Rasio elektrifikasi	60,47	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
2.2.1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	70.00	
		2.2.1.2. Indeks kualitas udara	77.62	
		2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.42	
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi				
3.1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	3.1.1.1. Nilai Tukar Petani	101,3 skor	
		3.1.1.2. Nilai Tukar Nelayan	105,3 skor	
3.1.2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	3.1.2.1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura :		IKU
		- Padi	232,170.12 ton	
		- Jagung	440,157.90 ton	
		- Kedelai	7,714.56 ton	
		- ubi Kayu	106,384.50 ton	
		3.1.2.2. Produksi Hasil Perkebunan :		IKU
		- Kelapa	42,241.18 ton	
- Tembakau	8,838.75 ton			
- Cabe Jamu	9,865.28 ton			



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		- Jambu Mente	4,822.48 ton	
		- siwalan	776,37 ton	
		3.1.2.3. Produksi Hasil Peternakan :		
		- Daging (ton)	4.518,999 ton	
		- Telur (ton)	2.845,105 ton	
		3.1.2.4. Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	50.117 ton	
		- Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	1.517 ton	
3.1.3.	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	3.1.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,5	
3.1.4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	3.1.4.1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	15 %	IKU
		3.1.4.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,30 ton	
		3.1.4.3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,55 %	
3.1.5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	3.1.5.1. Persentase Koperasi Sehat	2,98 %	
		3.1.5.2. Persentase Pertumbuhan UMKM	19 %	
3.1.6.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	3.1.6.1. Persentase Kunjungan Wisatawan	75 %	
		3.1.6.2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15 %	
3.1.7.	Meningkatnya Daya Tarik Investor	3.1.7.1. Jumlah Investor	2.500 orang	
		3.1.7.2. Jumlah Nilai Investor	449.935.027.958	
3.1.8.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.8.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,93 %	
Nilai SKM				
4.1.1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.1.1. Nilai SAKIP	BB	
		4.1.1.2. Opini BPK	WTP	
		4.1.1.3. Peringkat LPPD	12	
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	4.1.2.1. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik		
		- Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,9	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	82	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	78	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	91	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	78	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	74	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	83	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	83	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	80	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	80	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	86	
		4.1.2.2. E-Government		
		- Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit	
		- Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit	
Indek Desa Membangun				
5.1.1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	5.1.1.1. Persentase BUMDes Yang Sehat	4,9 %	
		5.1.1.2. Persentase Desa Mandiri	0 %	
		5.1.1.3. Persentase Desa Tertinggal	36,06%	
Indek Keamanan				
5.2.1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.2.1.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100 %	
5.2.2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	5.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	
		5.2.2.2. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	917,18 Skor	
Indeks Toleransi				
6.1.1.	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	6.1.1.1. Persentase Penyelesaian konflik sosial	0,36%	
6.1.2.	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	6.1.2.1. Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	75 %	IKU



**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

K keberhasilan atau kegagalan menjalankan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur dan dapat diukur. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai dan predikat sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Predikat
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	$80 \text{ s/d} < 95$	Berhasil
3.	$50 \text{ s/d} < 80$	Cukup Berhasil
4.	$0 \text{ s/d} < 50$	Kurang Berhasil



A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Adapun target kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 adalah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1.1.1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1.1.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,4 tahun	
		1.1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,27 tahun	
1.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,14 tahun	
1.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1.1.3.1. Angka Kemiskinan	19,53 %	
		1.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,95 %	
		1.1.3.3. Penurunan Masalah Sosial	0,45 %	
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur				
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2.1.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,41 %	IKU
		2.1.1.2. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,11 %	IKU
		2.1.1.3. Indeks Kinerja Irigasi	70,00 %	IKU
		2.1.1.4. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :		IKU
		a. Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	309.673 Orang	
b. Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	32 Menit			
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.2.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	
		2.1.2.2. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	89%	
		2.1.2.3. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%	
		2.1.2.4. Rasio elektrifikasi	60,47	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
2.2.1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	70.00	
		2.2.1.2. Indeks kualitas udara	77.62	
		2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.42	
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi				
3.1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	3.1.1.1. Nilai Tukar Petani	101,3 skor	
		3.1.1.2. Nilai Tukar Nelayan	105,3 skor	
3.1.2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	3.1.2.1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura :		IKU
		- Padi	232,170.12 ton	
		- Jagung	440,157.90 ton	
		- Kedelai	7,714.56 ton	
		- ubi Kayu	106,384.50 ton	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		3.1.2.2. Produksi Hasil Perkebunan :		IKU
		- Kelapa	42,241.18 ton	
		- Tembakau	8,838.75 ton	
		- Cabe Jamu	9,865.28 ton	
		- Jambu Menté	4,822.48 ton	
		- siwalan	776,37 ton	
		3.1.2.3. Produksi Hasil Peternakan :		
		- Daging (ton)	4.518,999 ton	
		- Telur (ton)	2.845,105 ton	
		3.1.2.4. Jumlah Produksi Hasil Perikanan (ton)	50.117 ton	
		- Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	1.517 ton	
3.1.3.	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	3.1.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,5	
3.1.4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	3.1.4.1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	15 %	IKU
		3.1.4.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,30 ton	
		3.1.4.3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,55 %	
3.1.5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	3.1.5.1. Persentase Koperasi Sehat	2,98 %	
		3.1.5.2. Persentase Pertumbuhan UMKM	19 %	
3.1.6.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	3.1.6.1. Persentase Kunjungan Wisatawan	75 %	
		3.1.6.2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15 %	
3.1.7.	Meningkatnya Daya Tarik Investor	3.1.7.1. Jumlah Investor	2.500 orang	
		3.1.7.2. Jumlah Nilai Investor	449.935.027.958	
3.1.8.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.8.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,93 %	
Nilai SKM				
4.1.1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.1.1. Nilai SAKIP	BB	
		4.1.1.2. Opini BPK	WTP	
		4.1.1.3. Peringkat LPPD	12	
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	4.1.2.1. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik		
		- Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,9	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	82	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	78	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	91	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	78	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	74	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	83	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	83	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	80	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	80	
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	86	
		4.1.2.2. E-Government		
		- Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit	
		- Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit	
Indek Desa Membangun				
5.1.1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	5.1.1.1. Persentase BUMDes Yang Sehat	4,9 %	
		5.1.1.2. Persentase Desa Mandiri	0 %	
		5.1.1.3. Persentase Desa Tertinggal	36,06%	
Indek Keamanan				
5.2.1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.2.1.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100 %	
5.2.2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	5.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender	100 %	
		5.2.2.2. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	917,18 Skor	
Indeks Toleransi				
6.1.1.	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	6.1.1.1. Persentase Penyelesaian konflik sosial	0,36%	
6.1.2.	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	6.1.2.1. Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	75 %	IKU

Dari 21 sasaran strategis RPJMD yang diperjanjikan pada tahun 2019 di atas ditetapkan sebanyak 4 sasaran dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja utama (IKU). Penetapan IKU dipertimbangkan atas dasar tema pembangunan tahun 2019 yaitu **“Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Agro Industri dan Wisata berbasis Alam, Budaya dan Religi”**. Adapun Sasaran/IKU tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Atas Dasar Tema Pembangunan
Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	63,41 %	DINAS PU. BINA MARGA	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	86,11 %		
		Indeks Kinerja Irigasi	%	70,00 %	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :				DINAS PERHUBUNGAN
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	309.673		
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	32		
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura :			DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		Padi	Ton	232,170.12		
		Jagung	Ton	440,157.90		
		Kedelai	Ton	7,714.56		
		ubi Kayu	Ton	106,384.50		
		Produksi Hasil Perkebunan				
		Kelapa	Ton	42,241.18		
		Tembakau	Ton	8,838.75		
		Cabe Jamu	Ton	9,865.28		
		Jambu Menté	Ton	4,822.48		
siwalan	Ton	776,4				
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	%	75 %	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dari 21 sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dilakukan pengukuran realisasi IKU serta Indikator kinerja sasaran lainnya baik realisasi tahun pelaksanaan maupun capaian terhadap target serta analisisnya. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 3.3

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	63,41 %	67,12%	105,85%	DINAS PU. BINA MARGA



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	86,11 %	91,92%	106,75%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	70,00 %	71,08%	101,54%	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :					DINAS PERHUBUNGAN
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	309.673	304.161	98,22%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	32	35	109,38%	
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura :					DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Padi	Ton	232.170.12	225.484,59	97,12%	
		Jagung	Ton	440.157.90	434.403,16	98,69%	
		Kedelai	Ton	7.714.56	6.244,01	80,94%	
		ubi Kayu	Ton	106.384.50	25.760,60	24,21%	
		Produksi Hasil Perkebunan :					
		Kelapa	Ton	42.241.18	44.376,40	105,05%	
		Tembakau	Ton	8.838.75	8.494,02	96,10%	
		Cabe Jamu	Ton	9.865.28	10.333,80	104,75%	
		Jambu Mente	Ton	4.822.48	7.971,83	165,31%	
		siwalan	Ton	776,4	753,04	96,99%	
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15%	0,24%	160,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	%	75 %	77%	103,27%	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
RATA-RATA CAPAIAN						103,39%	

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2019 sebesar 103,39%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2019 dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

REALISASI KINERJA PERSASARAN

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan” dengan dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup menghasilkan capaian rata-rata kinerja sebesar **92%** dengan predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.4

Realisasi Sasaran 1 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,4	5,46	85,31%
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,27	13,19	99,40%
Rata-Rata Capaian					92%

Sumber data : BPS Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2019 terealisasi 5,46 tahun dari target 6,32 tahun, sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah tahun 2019 sebesar 85.31%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,24 sebesar 5,22 tahun dibandingkan tahun lalu. Capaian angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2014 cenderung meningkat, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sumenep semakin baik.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2019 sebesar 13,19 tahun dari target 13,27 tahun, sehingga capaian sebesar 99,40%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 13,07 tahun. Angka capaian tahun 2018 dan 2019 tetap sama sebesar 99%.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2019 mencapai 100,11% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”**. Adapun capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Sasaran 2 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,14	71,22	100,11%
Rata-Rata Capaian					100,11%



Usia Harapan hidup di Kabupaten Sumenep dilihat dari realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, angka harapan hidup terus mengalami peningkatan. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 sebesar **100,11%** dengan target 71,14 tahun terealisasi 71,22 Tahun.

Tahun 2019 Angka Kematian ibu (AKI) 72,12 per 100.000 KH (11 orang) menurun dibandingkan pada Tahun 2018 78,3 per 100.000 KH (12 orang). Adapun penyebab kematian ibu pada tahun 2018 terbanyak adalah Pre Eklamsia Berat yaitu 5 orang, pendarahan 1 orang, infeksi 1 orang, penyakit jantung 2 orang dan lain-lain 2 orang.

Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2019 yaitu 2,03 per 1.000 KH (31 bayi) sedangkan Angka kematian bayi pada Tahun 2018 yaitu 2,09 per 1.000 KH (32 bayi). Jika melihat data tersebut bahwa jumlah kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 1 orang. Penyebab kematian bayi dikarenakan Asfiksia 12 bayi, BBLR sebanyak 6 bayi, dan lain-lain sebanyak 13 bayi.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akses Kesejahteraan Masyarakat” dengan 3 (tiga) indikator yaitu Angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka dan Penurunan Masalah Sosial. Capaian Kinerja sasaran 3 termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Sasaran 3 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	19,53	19,48	99,74%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,95	2,17	89,86%
		Penurunan Masalah Sosial	0,45	0,45	100%
Rata-Rata Capaian			96,54%		

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

a. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan pada tahun 2019 terealisasi 19,48% tahun dari target 19,58%, sehingga capaian angka rata-rata lama sekolah tahun



2019 sebesar 99,74%. Realisasi tersebut mengalami penurunan 0,68 sebesar 20,16% dibandingkan tahun lalu.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sebesar 2,17% dari target 1,95% tahun, sehingga capaian Tingkat Pengangguran Terbuka 89,86%.

c. Penurunan Masalah Sosial

Realisasi Penurunan Masalah Sosial pada tahun 2019 sebesar 0,45% dari target 0,45% tahun, sehingga capaian Penurunan Masalah Sosial 100%.

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dengan 5 (Lima) indikator kinerja mencapai **104,35%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Sasaran 4 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,41 %	67,12%	105,85%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,11 %	91,92%	106,75%	
		Indeks Kinerja Irigasi	70,00 %	71,08%	101,54%	
		Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :				
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	309.673	304.161	98,22%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	32	35	109,38%	
Rata-Rata Capaian			104,35%			

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2019 terealisasi 67,12% dari target 63,41%, sehingga capaiannya 105,85%. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan sehingga dalam perhitungannya Proporsi Panjang



Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dibagi menjadi 2, yaitu untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.

Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 72,80% sedangkan realisasinya adalah 72,00% dan Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan memiliki target 54,02% sedangkan realisasinya 56,65% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

Untuk angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 72,00% merupakan hasil dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah daratan 808,082 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah daratan sepanjang 1.125.539 km. Sedangkan angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 56,65% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik diwilayah kepulauan 227,848 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah kepulauan sepanjang 416,821 km.

b. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Proporsi Jumlah Jembatan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2019 terealisasi 91,92% dari target 86,11%, sehingga capaiannya 106,75%. Senada dengan Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik dalam perhitungannya juga dibagi menjadi 2, yaitu untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.

Untuk indikator kedua yaitu Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 88,89% sedangkan realisasinya 76,17% dan untuk Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan targetnya adalah 83,33% dan realisasinya 82,35% hal ini juga menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan indikator ini termasuk **Sangat Berhasil**.

Untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 97,73% yaitu hal



ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik di wilayah daratan 163 buah di bagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah daratan sebanyak 214 buah. Sedangkan untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 82,35% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan 28 buah dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah kepulauan sebanyak 34 buah.

c. Indeks Kinerja Irigasi

Indeks Kinerja Irigasi baru dilakukan pengukuran pada tahun 2019 dengan realisasi 71,08% dari target 70,00% sehingga indikator ini di kategorikan **Sangat Berhasil**. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 12/PRT/M/2015 tentang exploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penentuan indeks kinerja sistem irigasi sebagai berikut :

80 – 100	: kinerja sangat baik
70 – 79	: kinerja baik
55 – 69	: kinerja kurang dan perlu perhatian
< 55	: kinerja jelek dan perlu segera penanganan

Dapat disimpulkan bahwa indeks kinerja irigasi dikabupaten sumenep termasuk Kategori **Kinerja Baik**.

d. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan

Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan tahun terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan dan Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan

Kapasitas layanan angkutan kepulauan merupakan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut menuju daerah kepulauan. Kapasitas layanan angkutan kepulauan yang terlayani selama tahun 2019 adalah 304.161 orang. Sedangkan target pada tahun 2019 sebesar 309.673 Orang sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 98,22% dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.



2) Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan

Headway rata-rata angkutan pedesaan merupakan rata-rata interval waktu antara angkutan satu dengan angkutan lain yang diukur pada suatu periode waktu pada satu titik/lokasi tertentu. Headway rata-rata angkutan pedesaan pada tahun 2019 sebesar 35 menit dimana targetnya sebesar 32 menit sehingga didapat tingkat capaian sebesar 91,42% dapat dikategorikan **Berhasil**.

5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana pemukiman/perumahan secara memadai” dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai **115,54%** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Sasaran 5 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	82.75%	82.75%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	89%	82.75%	92.98%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%	2.80%	178.57%
		Rasio elektrifikasi	60,47	65.22%	107.86%
Rata-Rata Capaian			115,54%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100% namun masih belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 82,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,47% dengan dukungan melalui kegiatan Pembangunan Sanitasi dan Pembangunan Sanitasi (DAK), hal ini menunjukkan sebuah hasil



kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

b. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 89%, dengan hasil realisasi sebesar 82,75%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,47%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.

c. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh
Persentase Penurunan Luas Area Kumuh ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 2,58% sehingga capaian yang diperoleh indikator ini pada tahun 2019 sebesar 107,86%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

d. Rasio Elektrifikasi
Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 60,47% dan terealisasi sebesar 65,22%, sehingga capaian yang diperoleh indikator ini pada tahun 2019 sebesar 178,57%, hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya melebihi target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai **103,06%** dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.9

Realisasi Sasaran 6 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	70.00	67.78	96.93%
		Indeks kualitas udara	77.62	88.52	114.04%
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.42	74.15	98.32%
Rata-Rata Capaian			103,06%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks kualitas Air Sungai

Indeks Kualitas Air tahun 2019 adalah 67,78, nilai ini masih di bawah dari target yang ditetapkan yaitu 70,00, sehingga pencapaian kinerja sebesar 96,83 %. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 3 sungai (Patrean, Sarokah dan Marengan), masing-masing 2 titik lokasi (hulu dan hilir) dan frekuensi pemantaun dilakukan sebanyak 3 kali periode. Total sampel yang diujikan sebanyak 18 sampel, selanjutnya hasil uji laboratorium tersebut dianalisis pada parameter TSS, DO, BOD dan COD, untuk mengetahui status mutu air sungai dengan hasil sebagai berikut :

1. Status mutu air memenuhi sebanyak 8 sampel
2. Status mutu air tercemar ringan sebanyak 9 sampel
3. Status mutu air tercemar sedang sebanyak 1 sampel

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa parameter BOD masih tinggi. Hal ini disebabkan masih adanya aktivitas masyarakat membuang air limbah domestik. secara langsung ke badan air/sungai tanpa melalui proses pengolahan. Selain itu terdapat aktivitas pertanian dan peternakan juga terindikasi berkontribusi terhadap tingginya beberapa parameter tersebut. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.



b. Indeks kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 adalah 88,52 melebihi dari target kinerja yang ditetapkan 77,62 dengan capaian pencapaian kinerja sebesar 114,04 %. Pengujian kualitas udara dilakukan dengan metode Passive Sampler pada 4 titik lokasi pengukuran yaitu lokasi permukiman (Perum Bumi Sumekar Asri), lokasi transportasi (Jalan Trunojoyo), lokasi perkantoran (Kantor Bupati Sumenep) dan lokasi industri (PT. Tanjung Odi). Dari hasil pengukuran parameter kualitas udara dihasilkan nilai kualitas yang berada di bawah baku mutu, sehingga kualitas udara masih tergolong baik. Pencapaian target pada tahun 2019 disebabkan oleh masih banyaknya penanaman pohon-pohon peneduh sebagai penyerap polutan udara/emisi baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Berhasil**.

c. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan Tahun 2019 adalah 74,15 masih kurang dari target kinerja yang ditetapkan 75,42 dengan capaian kinerja sebesar 98,32 %. Pencapaian target pada tahun 2019 dilakukan dengan melakukan penambahan luas areal tutupan lahan dengan penanaman pohon yang berfungsi sebagai tutupan vegetasi yaitu pohon keras di sepadan sungai, pinggir/bahu/turus jalan dan areal lahan kritis dengan luasan 541,5 Ha. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih kurangnya penambahan luas area tutupan vegetasi yang dalam hal ini berkaitan dengan keterbatas anggaran yang tersedia. Perlu adanya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam menginventarisasi data dan penanaman sebagai penambahan tutupan vegetasi. Hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja relatif baik karena realisasinya mendekati dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Berhasil**.



7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator Nilai Tukar Nelayan masih belum ada nilai pencapaiannya karena masih ada beberapa data yang belum rilis dari BPS sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat dihitung. Untuk indikator yang dapat dilihat hasil pencapaiannya yaitu Indikator Nilai Tukar Petani dengan nilai capaian 100,10% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Sasaran 7 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	101,3 skor	101.4	100.10%
		Nilai Tukar Nelayan	105,3 skor	BPS blm rilis	BPS Blm Rilis
Rata-Rata Capaian					

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Nilai Tukar Petani

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Dan indikator ini baru dihitung tahun 2019 ini dengan bekerja sama dengan pihak Universitas Brawijaya. Nilai Tukar Petani tahun 2019 adalah 101,4 nilai ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 101,4, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,10 %.

Dari angka diatas (>) 100 ini dapat disimpulkan bahwa petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari harga konsumsinya . Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

b. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan



nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.

Untuk Dinas Perikanan Kabupaten sumenep belum dapat menghitung Nilai Tukar Nelayan karena data harga yang dibayarkan oleh nelayan masih belum rilis. Data yang hanya bisa dihitung oleh Dinas Perikanan adalah Jumlah Pendapatan Nelayan Perkapita dengan realisasi sebesar 36.575.807 dari yang ditargetkan sebesar 28.753.583 dengan capaian sebesar 105,21%

8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” dengan 4 (Empat) indikator kinerja mencapai **113,16%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Sasaran 8 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura :				
		Padi	232,170.12 ton	225.484.59	97.12%	
		Jagung	440,157.90 ton	434.403.16	98.69%	
		Kedelai	7,714.56 ton	6.244.01	80.94%	
		ubi Kayu	106,384.50 ton	25.760.60	24.21%	
		Produksi Hasil Perkebunan :				
		Kelapa	42,241.18 ton	44.376.40	105.05%	
		Tembakau	8,838.75 ton	8.494.02	96.10%	
		Cabe Jamu	9,865.28 ton	10.333.80	104.75%	
		Jambu Menté	4,822.48 ton	7.971.83	165.31%	
		siwalan	776,37 ton	753.04	96.99%	
		Produksi Hasil Peternakan :				
		Daging (ton)	4.518,999 ton	4.970.43	109.99%	
		Telur (ton)	2.845,105 ton	3.298.75	115.94%	
		Produksi Hasil Perikanan :				
		Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	48.600 ton	48.576.86	99.95%	
		Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	1.517 ton	4.188.01	276.07%	
Rata-Rata Capaian			113,16%			



Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Produksi tanaman pangan dan hortikultura

Capaian kinerja untuk produksi padi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 232.170,12 ton dan dicapai 225.484,59 ton (97,1%), jumlah produksi komoditas Padi ini tidak tercapai sesuai target dikarenakan luas tanam yang turun dibandingkan luas tanam yang sebelumnya ditargetkan, Jagung ditargetkan sebesar 440.157,90 ton dicapai 434.403,16 ton (98,7%).

Untuk tahun ini , produksi Kedelai turun drastis dikarenakan luas tanam yang menurun pada tahun ini dari pada tahun lalu, target yang ditetapkan sebesar 7.714 ton dicapai 6.244 ton (80,9%), jumlah produksi Kedelai masih jauh dari target yang direncanakan disebabkan karena minat petani untuk menanam Kedelai berkurang dan beralih ke komoditas lain karena harga yang lebih menjanjikan; sedangkan untuk Ubi kayu ditargetkan sebesar 106.384,50 ton dan dicapai hanya sebesar 25.760,60 ton (24,2%) .

b. Produksi Hasil Perkebunan

Capaian kinerja Produksi Hasil Perkebunan pada tahun 2019 untuk produksi Kelapa ditargetkan sebesar 42.241 ton dan dicapai 44.376,40 ton (105,1%), Tembakau ditargetkan sebesar 8.838,75 ton dicapai 8.494,02 ton (96,1%), Cabe Jamu ditargetkan sebesar 9.865 ton dicapai 10.333,80 ton (104,7%) , Jambu Mete ditargetkan sebesar 4.822 ton dicapai 7.971,83 ton (165,3%) dan Siwalan ditargetkan sebesar 776,37 ton dicapai sebesar 752,47 ton (96,9%).

Pada Tanaman Perkebunan ini , produksi Tembakau dan Siwalan tidak mencapai target dikarenakan kemarau panjang yang mengakibatkan produktivitas tanaman rendah sehingga akibatnya jumlah produksi juga tidak sesuai yang ditargetkan

c. Produksi Hasil Peternakan

Produksi Hasil Peternakan terdiri dari produksi daging dan produksi telur. Produksi ternak yaitu daging di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 4.518.999 kg produksi daging terealisasi sebesar 4.970.426 kg produksi daging dengan capaian realisasi kinerja



109,99%. Produksi telur di Kabupaten Sumenep dari target sebesar 2.845.105 kg produksi telur dengan realisasi sebesar 4.218.023 kg produksi telur dengan capaian realisasi kinerja 148,26%

d. Produksi Hasil Perikanan :

Produksi Hasil Perikanan terdiri Hasil Perikanan Tangkap dan Hasil Perikanan Budidaya. Adapun pencapaian kinerja indikator hasil perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 48.576,86 ton dari target indikator kinerja sebesar 48.600 ton dengan persentase capaian sebesar 99,95% sedangkan realisasi capaian kinerja jumlah hasil produksi budidaya tahun 2019 sebesar 4.188,01 ton dari target kinerja sebesar 1.517 ton atau mencapai 276,07%.

9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 124,90% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Sasaran 9 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,5	986.8	124.90%
Rata-Rata Capaian			124,90%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Untuk mengetahui perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dari nilai target Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 77,5. Sumber data untuk penghitungan PPH dengan menggunakan data Susenas yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep. Pada penghitungan PPH 2019, terdapat perubahan pada data



Susenas dibandingkan tahun sebelumnya, dimana komoditas bahan pangan yang menjadi sasaran survei bertambah.

Dari hasil perhitungan data Susenas, diperoleh skor PPH di tingkat konsumsi adalah 96,8 atau sekitar 124,9% dari skor PPH yang ditargetkan. Dari hasil tersebut, dapat dianalisa secara umum bahwa terdapat peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat terutama pada kelompok pangan sayur dan buah. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak dari program optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang banyak dialokasikan baik dari sumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan” dengan 3 (tiga) indikator kinerja mencapai 117,47% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Sasaran 10 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0,15%	0,24%	160%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,30 %	7.01%	52.71%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,55%	9.15%	139.69%
Rata-Rata Capaian			117,47%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah tahun 2019 ditargetkan 0,15% dengan realisasi 0,24% sehingga capaian kinerja 160% dengan Predikat “**Sangat Berhasil**”.



b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2019 terealisasi 7,01% dari yang ditargetkan 13,30% dengan capaian kinerja 52,71% dengan Predikat “**Cukup Berhasil**”.

c. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian tahun 2019 terealisasi 6,55% dari yang ditargetkan 9,15% dengan capaian kinerja 139,69% dengan Predikat **Sangat Berhasil**”.

11. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 94,21% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14

Realisasi Sasaran 11 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	2,98%	4.5%	151.01%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	19%	7.11%	37.42%
Rata-Rata Capaian				94,21%	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Koperasi Sehat

Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2019 sebanyak 72 koperasi atau 4,5% dari jumlah Koperasi yang ada di kabupaten Sumenep sebanyak 1.609. Capaian Kinerja Persentase Koperasi Sehat sebesar 151,01% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Koperasi Sehat meningkat dikarenakan adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan Koperasi dalam mengelola Koperasi khususnya.

b. Persentase Pertumbuhan UKM

Persentase Pertumbuhan UKM tahun 2019 terealisasi 7,11% dari yang ditargetkan 19% dengan capaian kinerja 37,42% dengan Predikat “**Kurang Berhasil**”.



12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 81,07% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Sasaran 12 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	75%	75,23%	100,31%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15%	9.32%	62.13%
Rata-Rata Capaian				81,07%	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Kunjungan Wisatawan

Persentase Kunjungan Wisatawan tahun 2019 terealisasi sebesar 75,23% dari target sebesar 75%, capaian Kinerja 100,31% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami keberhasilan dimana target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebanyak 1.498.000 orang (wisnus dan wisman) terealisasi sebanyak 1.498.486 orang (wisnus dan wisman) dimana jumlah kunjungan tercapai 100,31 %. Hal ini disebabkan adanya lokasi wisata baru, semula lokasi wisata adalah 25 lokasi bertambah menjadi 28 lokasi yang didukung dengan peningkatan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumenep disamping adanya penambahan pengunjung terkait program Visit Sumenep Tahun 2019 yang banyak diadakan even even sesuai Kalender Even Tahun 2019.

b. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Pada tahun 2019 Realisasi persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 9,32% dari target 15% dengan capaian 62,12% predikat “**Cukup Berhasil**”, diperoleh dari target sektor



pariwisata Rp. 23.014.714.070- dibagi target pendapatan Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 246.946.236.958-.

13. Meningkatkan Daya Tarik Investor

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Tarik Investor” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 245,12% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

Realisasi Sasaran 13 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	6.206 orang	4.260 orang	68.64%
		Jumlah Nilai Investor	449.935.027.958	1.896.914.558.750	421.60%
Rata-Rata Capaian			245,12%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Jumlah Investor

Jumlah Investor tahun 2019 terealisasi sebesar 4.260 orang dari target sebesar 6.206 dengan capaian Kinerja 68,64% dengan predikat “**Cukup Berhasil**”.

b. Jumlah Nilai Investor

Pada tahun 2019 Realisasi Jumlah Nilai Investor sebesar 1.896.914.558.750 dari target 449.935.027.958 dengan capaian 421,60% predikat “**Sangat Berhasil**”.

14. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 89,75% dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.17

Realisasi Sasaran 14 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,93%	9.81%	89.75%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2019 terealisasi sebesar 75,23% dari target sebesar 75%, capaian Kinerja 100,31% dengan predikat “**Sangat Berhasil**”.

15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah” terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, dari tiga indikator yang ada hanya satu indikator yang masih belum rilis yaitu peringkat LPPD. Peringkat LPPD masih menunggu dari Kemendagri. Untuk Opini BPK dengan nilai capaian 100% termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” dan indikator Nilai SAKIP dengan nilai capaian 98% termasuk Predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Sasaran 15 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB	B	98%
		Opini BPK	WTP	Proses Audit BPK	-
		Peringkat LPPD	12	Belum rilis	-
Rata-Rata Capaian					

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :



a. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kabupaten Sumenep tahun 2019 adalah “B” dari target nilai “BB”. Nilai Sakip ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun kemarin walaupun masih dengan predikat yang sama.

b. Opini BPK

Opini BPK Tahun 2019 masih belum dirilis dari BPK karena saat ini Kabupaten Sumenep masih proses Audit BPK.

c. Peringkat LPPD

Peringkat LPPD pada tahun 2019 masih belum rilis dari Kemendagri. Namun melihat track record beberapa tahun terakhir, tiap tahun peringkat LPPD naik.

16. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 121,35% dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

. Tabel 3.19

Realisasi Sasaran 16 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik			94,56%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,9	3.25	112.07%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	82	85	103.66%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	78	85	108.97%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	91	4.36	4.79%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	78	82.23	105.42%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	74	76.96	104.00%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	83	85.25	102.71%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	83	85.25	102.71%	
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	80	85.33	106.66%	
		E-Government				



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit	75	241,94%
		Jumlah OPD Yang Telah Terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit	75	241,94%
Rata-Rata Capaian			121,35%		

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik

Target Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik tahun 2019 sebesar 95,8 dengan realisasi 94,56 dengan capaian indikator 98.71% . Nilai SKM 94,56 menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

b. E-government

Jumlah OPD yang telah menyelenggarakan E-government dikabupaten Sumenep berjumlah 75 OPD dari yang ditargetkan sejumlah 31 OPD dengan capaian sebesar 241,94% predikat "**Sangat Berhasil**". Jumlah OPD yang telah terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan dikabupaten Sumenep 75 OPD dari yang ditargetkan sejumlah 31 OPD dengan capaian sebesar 241,94% predikat "**Sangat Berhasil**".

17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial" dengan 3 (Tiga) indikator kinerja mencapai 62,38% dan termasuk predikat "**Berhasil**" sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.20

Realisasi Sasaran 17 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	49%	1,52%	3,10%
		Persentase Desa Mandiri	0%	0%	100%
		Persentase Desa Tertinggal	36,06%	30,30%	84,03%
Rata-Rata Capaian				62,38%	

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase BUMDes Yang Sehat

Capaian kinerja Persentase BUMDes Yang Sehat Tahun 2019 sebesar 3,10% dengan predikat **“Kurang Berhasil”**. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 1,52% dari target 49%. Jumlah BUMDes sehat dikabupaten Sumenep 5 BUMDes dari 330 BUMDes yang ada di Kabupaten Sumenep.

b. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri tahun 2019 ditargetkan 0% dengan realisasi 0% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan Predikat **“Sangat Berhasil”**.

c. Persentase Desa Tertinggal

Persentase Desa Tertinggal ditargetkan sebesar 36,06% dan terealisasi sebesar 30,30% dengan capaian sebesar 84,03% predikat **“Berhasil”**. Jumlah Desa Tertinggal di Kabupaten Sumenep terdapat 100 desa dari 330 desa. Jumlah desa tertinggal ini berkurang 74 desa dari tahun 2018.

18. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 93,15% dan termasuk predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.21

Realisasi Sasaran 18 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100%	93.15%	93.15%

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Capaian kinerja Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Tahun 2019 sebesar 93,15% dengan predikat **“Berhasil”**. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 93,15% dari target 100%.

19. Meningkatkan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak” dengan 2 (dua) indikator kinerja, untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender masih belum ada nilai pencapaiannya karena menunggu rilis dari BPS sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat dihitung. Untuk capaian indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak sebesar 99,17% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.22

Realisasi Sasaran 19 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	100%	BPS belum rilis	BPS belum rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	917,18 Skor	909.6	99.17%
Rata-Rata Capaian					



Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019 masih belum bisa dihitung karena Indeks Pemberdayaan Gender masih belum dirilis oleh pihak BPS.

b. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak

Capaian kinerja Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 sebesar 99,17% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Capaian ini didapat dari realisasi sebesar 909,6 dari target 917,18.

20. Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Sasaran 20 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	100%	100%	100%

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

21. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya” dengan 1 (Satu) indikator kinerja mencapai 103,27% dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 8.24

Realisasi Sasaran 21 Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	75%	77,45%	103,27%

Pencapaian indikator Indeks Pelestarian Seni dan Budaya Tahun 2019 sebesar 103,27% dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Capaian ini didapat dari perbandingan realisasi sebesar 77,45% dengan target sebesar 75%.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja per sasaran 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel dan analisisnya berikut :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Tabel 3.25

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,22	5,23	5,46
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,74	13,07	13,19

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,04 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,18 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 2 tahun terakhir sebesar 0,11.
- 2) Indikator Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,33 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,12 dari tahun 2018. Dengan demikian



capaian rata-rata indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 2 tahun terakhir sebesar 0,23.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.26

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,71	70,94	71,22

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,23 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,28 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Harapan Hidup 2 tahun terakhir sebesar 0,26.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.27

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	19,62	20,16	19,48%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,83%	1,79%	2,17%
		Penurunan Masalah Sosial	%	0,16%	0,25%	0,45%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan rincian per indikator sebagai berikut :

- 1) Indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,54 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,68 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Angka Kemiskinan 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,61.



- 2) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 1,04 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,38 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 2 tahun terakhir Mengalami Kenaikan sebesar 0,71.
- 3) Indikator Penurunan Masalah Sosial pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Penurunan Masalah Sosial 2 tahun terakhir sebesar 0,05.

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Tabel 3.28

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
				2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,31%	67,12%	67,12%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	93,79%	91,92%	91,92%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	-	-	71,08%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :					
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang				304.161
	Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit				35	

- 1) Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,81 dari tahun 2017 sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 67,12. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik 2 tahun terakhir mengalami Persamaan sebesar 0,9.
- 2) Indikator Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 1,87 dari tahun 2017 sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 91,79. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Proporsi Jumlah Jembatan 2 tahun terakhir Mengalami Kenaikan sebesar 0,9.



- 3) Indikator Kinerja Irigasi merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019.
- 4) Indikator Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan Terdiri dari Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan dan Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019.

5. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai

Tabel 3.29

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	80,87%	81,28%	82,75%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	76,28%	81,28%	82,75%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	%	8,95%	3%	2,80%
		Rasio elektrifikasi	%	56,84%	60,59%	65,22%

- 1) Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,41 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,47 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,94.
- 2) Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,47 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 2,23.
- 3) Indikator Persentase Penurunan Luas Area Kumuh pada tahun 2018 mengalami Peningkatan Capaian kinerja penurunan luas area kumuh sebesar 5.95 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Peningkatan Capaian kinerja penurunan luas area kumuh sebesar 0.2



dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Penurunan Luas Area Kumuh 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 3.07.

- 4) Indikator Rasio elektrifikasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,75 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4,63 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Rasio elektrifikasi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 4,19.

6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Tabel 3.30

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		63,33	63,33	67,78
		Indeks kualitas udara		88,84	87,27	88,52
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi			73,67	73,91

- 1) Indikator kualitas air sungai pada tahun 2018 mengalami Capaian kinerja sama sebesar 63.33 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4,45 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks kualitas air sungai 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 4,19.
- 2) Indikator kualitas udara pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 1,57 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,25 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks kualitas udara 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,16.
- 3) Indikator Tutupan Lahan/Vegetasi pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,24 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,24 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,16



7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tabel 3.31

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani		-	-	101,4
		Nilai Tukar Nelayan		BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis	BPS Belum Rilis

- 1) Indikator Nilai Tukar Petani merupakan indikator baru di RPJMD perubahan sehingga penghitungannya baru dilakukan pada tahun 2019.
- 2) Indikator Nilai Tukar Nelayan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 belum dirilis oleh BPS

8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Tabel 3.32

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura				
		Padi	Ton	277.740,07	199.958,27	225.484,59
		Jagung	Ton	413.053,62	406.462,92	434.403,16
		Kedelai	Ton	6.290,49	22.876,89	6.244,01
		ubi Kayu	Ton	52.283,14	25.575,53	25.760,60
		Produksi Hasil Perkebunan				
		Kelapa	Ton	43.968,38	44.360,33	44.376,40
		Tembakau	Ton	8.171,10	7.707,10	8.494,02
		Cabe Jamu	Ton	10.198,29	10.314,96	10.333,80
		Jambu Mente	Ton	5.247,78	6.523,37	7.971,83
		siwalan	Ton	749,33	753,04	753,04
		Produksi Hasil Peternakan				
		Daging (ton)	Ton	4.636,21	4.629,70	4.970,43
		Telur (ton)	Ton	3.287.185	2.781.838	3.298,75
		Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	Ton	47.605,44	47.927,52	48.576,86
		Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	Ton	532.630,31	661.676,02	4.188,01

- 1) Capaian Produksi tanaman pangan dan hortikultura Terdiri dari :
 - a) Padi pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 77.781,8 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 55,526.32 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-



rata indikator Padi 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 66,654.06

- b) Jagung pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 6,590.7 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 27,940.24 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 17,265.47
 - c) Kedelai pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 16,586.43 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 16,632.88 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 16,609.655
 - d) Ubi Kayu pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 26,707.61 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 185.07 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jagung 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 13,446.34.
- 2) Capaian Produksi Hasil Perkebunan Terdiri dari :
- a) Kelapa pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 391.95 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 16.07 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Kelapa 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 204.01.
 - b) Tembakau pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 464 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 786.92 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Tembakau 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 625.46.
 - c) Cabe Jamu pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 116.67 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 18.84 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Cabe Jamu 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 67.755.



- d) Jambu Mente pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 1,275.59 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,448.46 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jambu Mente 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 1,362.025.
- e) Siwalan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 3.71 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 Tidak mengalami Perubahan dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Siwalan 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 1.855.
- 3) Capaian Produksi Hasil Peternakan Terdiri dari :
- a) Daging (Ton) pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 6.51 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 340.73 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Daging 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 173.62.
- b) Telur (ton) pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 505,347 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 2,778,539.25 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Telur (ton) 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 1,641,943.125.
- c) Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton) pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 322.08 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 649.34 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton) 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 485.71.
- d) Jumlah produksi hasil perikanan budidaya pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 129,045.71 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 657,488.01 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah produksi hasil perikanan budidaya 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 393,266.86.



9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Tabel 3.33

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	75,7	97,2	96,8

- 1) Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 21,5 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,24 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,4

10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Tabel 3.34

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,25%	0,23%	0,24%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,87%	8,17%	7,01%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,67%	9,59%	9,15%

- 1) Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,01 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,01
- 2) Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 1,3 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 1,16 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks



Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 1,23

- 3) Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 2,92 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,44 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 1,68.

11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Tabel 3.35

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	5,72 %	7,49 %	4,5%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	5,30 %	4,5 %	7,11%

- 1) Indikator Persentase Koperasi Sehat pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 1,77 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 2,99 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Koperasi Sehat 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 2,38.
- 2) Indikator Persentase Pertumbuhan UMKM pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,8 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 2,61 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Pertumbuhan UMKM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 1,70.

12. Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Tabel 3.36

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	68%	133%	75%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	7,73%	8,42%	9,32%



- 1) Indikator Persentase Kunjungan Wisatawan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 65% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 58% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Persentase Kunjungan Wisatawan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 3,5%.
- 2) Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 0,69% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0,9% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 0,8%.

13. Meningkatnya Daya Tarik Investor

Tabel 3.37

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	3.784	4.156	4260
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	1.792.222.900.671	1.850.649.367.233	1.896.914.558.750

- 1) Indikator Jumlah Investor pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 476 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 104 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Investor 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 290.
- 2) Indikator Jumlah Nilai Investor pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 58,426,466,562 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 46,265,191,517 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Jumlah Nilai Investor 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 52,345,829,039.5.



14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.38

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,82%	8,28%	9,81%

1) Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,54% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,53% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 1,03%.

15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.39

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		B	B	B
		Opini BPK		WTP	WTP	Proses Audit BPK
		Peringkat LPPD		17	10	Belum Rilis

Realisasi Indikator Nilai SAKIP 3 (tiga) tahun terakhir walaupun predikatnya tetap “B” namun nilai tiap tahunnya naik yaitu pada tahun 2017= 60,12, tahun 2018= 67.58 atau (**naik 7,46**), sedangkan nilai tahun 2019= 68,50 atau (**naik 0,92**). Untuk indikator Opini BPK dan Peringkat LPPD masih belum rilis.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Tabel 3.40

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik				
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		3,03	3,25	3,25



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian		80	81	85
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo		n/a	80	85
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan		NA	NA	4,36
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan		80,30	82,92	82,23
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan		n/a	n/a	76,96
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM		78,27	81,53	85,25
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat		78,27	81,53	85,25
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang		75,10	75,13	85,33
		E-Government				
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government		15	66	75
		Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan		15	66	75

1) Capaian Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik Terdiri dari :

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 0,22% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 tidak mengalami Kenaikan sebesar 0% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan 2 tahun terakhir baik sebesar 0,11%.
- b) Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 1%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 4% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 2,5%.
- c) Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo pada tahun 2018 Belum ada capaian dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 5% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo 1 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 5%.
- d) Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan hanya dilakukan capaian kinerjanya pada tahun 2019 sebesar 4,36% .
- e) Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 2,62%. dari tahun 2017 sedangkan



pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 0,69% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 0,96%.

- f) Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan hanya dilakukan capaian kinerjanya pada tahun 2019 pada tahun 2019 sebesar 76,96%.
- g) Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 3,26%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 3,72% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 3,49%.
- h) Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 3,26%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 3,72% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 3,49%.
- i) Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang E-Government pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 0,03%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 10,2% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang E-Government 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 10,23%.
- j) Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 51%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 9% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 30%.
- k) Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 51%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 9% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata



Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 30%.

17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Tabel 3.41

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	%	0,61%	1,52%	1,52%
		Persentase Desa Mandiri	%	0	0	0,00%
		Persentase Desa Tertinggal	%	53,64%	52,73%	30,30%

- 1) Indikator Persentase BUMDes yang sehat pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,91%. dari tahun 2017 sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 1.52%. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase BUMDes yang sehat 2 tahun terakhir mengalami Persamaan sebesar 0,76%.
- 2) Indikator Persentase Desa Mandiri pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Pengalami Persamaan Sebesar 0%.
- 3) Indikator Persentase Desa Tertinggal pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 0,91%. dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Penurunan sebesar 22,43% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Desa Tertinggal 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 11,67%.

18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 3.42

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	57%	91,52%	93,15%



Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 34,52% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 1,63% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 18,07%.

19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.43

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		54.90	53.81	BPS Belum Rilis
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak		758	639	909,6

- 1) Indikator Pemberdayaan Gender pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 1,09 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 BPS Belum Merilis. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Pemberdayaan Gender 2 tahun terakhir mengalami Penurunan sebesar 26,90.
- 2) Indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 119 dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 270.6 dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 194.8.

20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Tabel 3.44

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	82%	83%	100%



Indikator Persentase Penyelesaian konflik sosial pada tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 1% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 17% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Persentase Penyelesaian konflik sosial 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 9%.

21. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Tabel 3.45

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	%	64%	63%	77,45%

Indikator Pelestarian Seni dan Budaya pada tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 1% dari tahun 2017 sedangkan pada tahun 2019 mengalami Kenaikan sebesar 14,45% dari tahun 2018. Dengan demikian capaian rata-rata Indeks Pelestarian Seni dan Budaya 2 tahun terakhir mengalami Kenaikan sebesar 7,72.

Dari uraian perbandingan antara realisasi kinerja persasaran tahun 2019 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya tersebut di atas, dapat kami kelompokkan realisasi sasaran/IKU berdasarkan IKU tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.46

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan IKU tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	65,31%	67,12%	67,12%
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	93,79%	91,92%	91,92%
		Indeks Kinerja Irigasi	%	-	-	71,08%
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :				
	Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang				304.161



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit			35
2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura				
		Padi	Ton	277.740,07	199.958,27	225.484,59
		Jagung	Ton	413.053,62	406.462,92	434.403,16
		Kedelai	Ton	6.290,49	22.876,89	6.244,01
		ubi Kayu	Ton	52.283,14	25.575,53	25.760,60
		Produksi Hasil Perkebunan				
		Kelapa	Ton	43.968,38	44.360,33	44.376,40
		Tembakau	Ton	8.171,10	7.707,10	8.494,02
		Cabe Jamu	Ton	10.198,29	10.314,96	10.333,80
		Jambu Menté	Ton	5.247,78	6.523,37	7.971,83
		siwalan	Ton	749,33	753,04	753,04
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,25%	0,23%	0,24%
4	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya		64%	63%	77,45%

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2019 sebesar 103,39%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa peningkatan capaian realisasi kinerja dari tahun ke tahun CUKUP STABIL.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Tabel 3.47

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
				s/d TAHUN 2019	2021	AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,46	7,65	71,37%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,19	13,94	94,62%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Rata-rata lama Sekolah sampai dengan tahun 2019 sebesar 5,46 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 7,65 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 71,37%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 28,63%.
- 2) Capaian sasaran strategis indikator Angka Harapan lama Sekolah sampai dengan tahun 2019 sebesar 13,19 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 13,94 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 94,62%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,38%.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.48

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,22	71,50	99,61%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH) sampai dengan tahun 2019 sebesar 71,22 tahun, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 71,50 tahun. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar



99,61%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 0,39%.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.49

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	19,48%	19,16 %	98,36%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,17%	1,85%	85,25%
		Penurunan Masalah Sosial	%	0,45%	0,55%	122,22%

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

- 1) Angka Kemiskinan sampai dengan tahun 2019 sebesar 19,48%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 19,16%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 98,86%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 1,14%.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,17%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 1,85%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 85,25%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 14,75%.
- 3) Penurunan Masalah Sosial sampai dengan tahun 2019 sebesar 0,45%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,55%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 122,22%. Capaian kinerja Penurunan Masalah Sosial sampai dengan tahun 2019 melebihi target RPJMD kedepan sebesar 22,22%.



4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Tabel 3.50

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,12%	65,46 %	103%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	91,92%	60 %	153%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	71,08%	77 %	92%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :					
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	304.161	322.164	94,41%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	35	30	116,67%	

- 1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sampai dengan tahun 2019 sebesar 67,12%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 64,46%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 103%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 3%.
- 2) Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sampai dengan tahun 2019 sebesar 91,92%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 60% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 153%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 53%.
- 3) Indeks Kinerja Irigasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 71.08%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 70%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 92%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 8%.
- 4) Capaian Indikator Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan terdiri dari:
 - a) Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan sampai dengan tahun 2019 sebesar 304,161 sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 322,164. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja



akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 94,41%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,51%.

- b) Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan sampai dengan tahun 2019 sebesar 35, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 30. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 116,67%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 16,67%.

5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Tabel 3.51

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	82,75%	100 %	82,75%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	82,75%	100 %	82,75%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	%	2,80%	5 %	178,57%
		Rasio elektrifikasi	%	65,22%	64,47	56,00%

- 1) Persentase rumah tinggal bersanitasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 82,75% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 82,75%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 17,25%.
- 2) Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sampai dengan tahun 2019 sebesar 82,75% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 82,75%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 17,25%.



- 3) Persentase Penurunan Luas Area Kumuh sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,80%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 5% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 178,57%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 78,57%.
- 4) Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 65,22% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 64,47%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 56,00%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 44%.

6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Tabel 3.52

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		67,78	70,00	96,83%
		Indeks kualitas udara		88,52	80,56	109,88%
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi		74,15	76,30	97,18%

- 1) Indeks kualitas air sungai sampai dengan tahun 2019 sebesar 67,78% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 70,00%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 96,83%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 3,17%.
- 2) Indeks kualitas udara sampai dengan tahun 2019 sebesar 88,52%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 80,56% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 109,88%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 9,88%.



- 3) Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 74,15% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 76,30%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 97,18%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 2,82%.

7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Tabel 3.53

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani		101,4	115,30	87,94%
		Nilai Tukar Nelayan		BPS Belum Rilis	119,70	-

- 1) Angka Nilai Tukar Petani sampai dengan tahun 2019 sebesar 101,4% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 115,30%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 87,94%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 12,06%.
- 2) Angka Nilai Tukar Nelayan target pada tahun RPJMD sebesar 119,70%. Capaian 2019 dan Capaian Akhir RPJMD Belum Dirilis

8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Tabel 3.54

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan hortikultura				
		Padi	Ton	225.484,59	241.088,0	93,53%
		Jagung	Ton	434.403,16	457.444,6	94,96%
		Kedelai	Ton	6.244,01	8.010,3	77,95%
		ubi Kayu	Ton	25.760,60	108.635,0	23,71%
		Produksi Hasil Perkebunan				
		Kelapa	Ton	44.376,40	42.663,9	104,01%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tembakau	Ton	8.494,02	9.242,3	91,90%
		Cabe Jamu	Ton	10.333,80	9.868,2	104,72%
		Jambu Menté	Ton	7.971,83	4.822,3	165,31%
		siwalan	Ton	753,04	776,4	96,99%
		Produksi Hasil Peternakan				
		Daging (ton)	Ton	4.970,43	4.609.831,0	0,11%
		Telur (ton)	Ton	3.298,75	2.931.098,0	0,11%
		Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	Ton	48.576,86	49.500,0	98,14%
		Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	Ton	4.188,01	707.260,0	0,59%

- 1) Capaian produksi tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari :
 - a) Padi sampai dengan tahun 2019 sebesar 225.484,59 sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 241.088,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 93,53%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 6,47%.
 - b) Jagung sampai dengan tahun 2019 sebesar 434.403,16. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 457.444,6. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 94,96%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,04%.
 - c) Kedelai sampai dengan tahun 2019 sebesar 6.244,01. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 8.010,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 77,95% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 22,05%.
 - d) Ubi Kayu sampai dengan tahun 2019 sebesar 25.760,60. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 108.635,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 23,71% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 76,29%.



- 2) Capaian produksi Hasil Perkebunan terdiri dari :
- a) Kelapa sampai dengan tahun 2019 sebesar 44.376,40. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 42.663,9. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 104,01%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 4,01%.
 - b) Tembakau sampai dengan tahun 2019 sebesar 8.494,02. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9.242,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 91,90% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 8,1%.
 - c) Cabai Jamu sampai dengan tahun 2019 sebesar 10.333,80.. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9,868,2. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 104,72%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 4,72%.
 - d) Jambu Mente sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,971,83. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 4.822,3. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 165,31%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 65,31%.
 - e) Siwalan sampai dengan tahun 2019 sebesar 753,04. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 776,4. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 96,99% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 3,01%.
- 3) Capaian produksi Hasil Peternakan terdiri dari :
- a) Daging sampai dengan tahun 2019 sebesar 4.970,43. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 4.609.831,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian



sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 0,11% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 99,89%.

- b) Telur sampai dengan tahun 2019 sebesar 3.298,75. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 2.931.098,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 0,11% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 99,89%.
- c) Jumlah Produksi Hasi Perikanan sampai dengan tahun 2019 sebesar 48.576,86. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 49.500,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 98,14% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 1,86%.
- d) Jumlah Produksi Hasi Perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2019 sebesar 4.188,01. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 707.260,0. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 0,59% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 99,41%.

9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Tabel 3.55

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	96,8	79,5	121,76%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sampai dengan tahun 2019 sebesar 96,8%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 79,5% Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 121,76%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 21,76%.



10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Tabel 3.56

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,24%	0,15 %	160,00%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,01%	13,97 %	50,18%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	9,15%	6,77%	135,16%

- 1) Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2019 sebesar 0,24%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,15%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 160,00%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 60%.
- 2) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,01% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 13,97%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 50,18%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 49,82%.
- 3) Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian sampai dengan tahun 2019 sebesar 6,77%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9,15%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 135,16%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 35,16%.



11. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Tabel 3.57

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	4,5%	3 %	150,00%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	7,11%	10 %	71,10%

- 1) Persentase Koperasi Sehat sampai dengan tahun 2019 sebesar 4,5%, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 3%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 150,00%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 50%.
- 2) Persentase Pertumbuhan UMKM sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,11% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 10%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 71,11%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 28,89%.

12. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata

Tabel 3.58

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	75%	90%	83,33%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	9,32%	15%	62,13%

- 1) Persentase Kunjungan Wisatawan sampai dengan tahun 2019 sebesar 75% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 90%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas



capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 83,33%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 16,67%.

- 2) Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sampai dengan tahun 2019 sebesar 9,32% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 15%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 62,13%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 37,87%.

13. Meningkatnya Daya Tarik Investor

Tabel 3.59

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	4260	6,827	62.40%
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	1,896,914,558,750	481,620,593,307	393.86%

- 1) Jumlah Investor sampai dengan tahun 2019 sebesar 4260 sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 6,827. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 62,40%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 32,2%.
- 2) Jumlah Nilai Investor sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,896,914,558,750, sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 481,620,593,307. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 393,86%. Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 293,86%.



14. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.60

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,81%	10,85%	90,41%

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar 9,81% sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 10,85%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 90,41%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 9,59%.

15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.61

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		B	BB	98%
		Opini BPK		Proses Audit BPK	WTP	-
		Peringkat LPPD		Belum Rilis	7	-

- 1) Nilai SAKIP sampai dengan tahun 2019 mendapat nilai B sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar BB. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 98%. Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 12%.
- 2) Opini BPK sampai dengan tahun 2019 masih belum rilis karena masih proses BPK. Namun melihat *track record* di dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Sumenep mendapatkan



predikat WTP, sehingga Kabupaten Sumenep optimis Opini BPK ini dapat dipertahankan mengingat kinerja yang terus ditingkatkan dan terus menerus melakukan perbaikan.

- 3) Peringkat LPPD untuk tahun 2019 masih belum rilis dari Kemendagri, sedangkan target pada tahun RPJMD adalah peringkat 7.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Tabel 3.62

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik						
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		3.25	3.1	104.84%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian		85	99	85.86%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo		85	83	102.41%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan		4.36	95	4.59%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan		82.23	83	99.07%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan		76.96	82	93.85%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM		85.25	87	97.99%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat		85.25	87	97.99%		
		Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang		82.25	87	94.54%		
		E-Government						
		Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government			75	31	241.94%	
		Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan			75	31	241.94%	

- 1) Capaian Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik terdiri dari :
 - a) Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2019 sebesar 3,25%. sedangkan target pada tahun RPJMD



sebesar 3,1%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 104,8% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 4,8%.

- b) Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian sampai dengan tahun 2019 sebesar 85%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 9,9%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 85,86% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 14,14%.
- c) Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo sampai dengan tahun 2019 sebesar 85%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 83%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 102,41% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 2,41%.
- d) Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan sampai dengan tahun 2019 sebesar 4,36%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 95%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 4,59% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 95,41%.
- e) Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan sampai dengan tahun 2019 sebesar 82,23%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 83%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 99,07% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 0,93%.
- f) Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan sampai dengan tahun 2019 sebesar 76,96%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 82%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 93,85% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 6,15%.



- g) Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM Sekretariat Dewan sampai dengan tahun 2019 sebesar 85,25%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 87%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 97,99% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 2,01%.
- h) Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat sampai dengan tahun 2019 sebesar 85,25%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 87%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 97,99% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 2,01%.
- i) Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang E-Government sampai dengan tahun 2019 sebesar 85,25%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 87%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 94,54% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 5,46%.
- j) Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government sampai dengan tahun 2019 sebesar 75%.. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 31%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 241,94% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 141,94%.
- k) Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 sebesar 75%.. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 31%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 241,94% Capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun 2019 sudah melebihi target RPJMD sebesar 141,94%.



17. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Tabel 3.63

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 17 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	%	1.52%	2.99%	50.84%
		Persentase Desa Mandiri	%	0.00%	0.3%	0.00%
		Persentase Desa Tertinggal	%	30.30%	37.27%	81.31%

- 1) Persentase BUMDes Yang Sehat sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,52%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 2,99%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 50,84% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 49,16%.
- 2) Persentase Desa Mandiri sampai dengan tahun 2019 sebesar 0,00%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 0,3%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 0,00% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 100%.
- 3) Persentase Desa Tertinggal sampai dengan tahun 2019 sebesar 30,30%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 37,27%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 81,31% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 18,69%.



18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 3.64

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 18 Terhadap Akhir Periode
RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	93.15%	100%	93.15%

- 1) Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) sampai dengan tahun 2019 sebesar 93,15%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 93,15% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 6,85%.

19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 3.65

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 19 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		BPS Belum Rilis	100	-
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak		909.6	1109.79	81.96%

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender sampai dengan tahun 2019 Belum ada Capaian belum sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka Belum tercapai.



- 2) Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak sampai dengan tahun 2019 sebesar 99,6. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 1109,79. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 81,96% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 18,04%.

20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Tabel 3.66

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 20 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	100%	100%	100.00%

Persentase Penyelesaian konflik sosial sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 100%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 100,00%. Sehingga Capaian pada tahun ini hampir tetap dipertahankan hingga akhir periode RPJMD.

21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Tabel 3.67

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 21 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2019	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya		77.45%	80%	96.81%

Indeks Pelestarian Seni dan Budaya sampai dengan tahun 2019 sebesar 77,45%. sedangkan target pada tahun RPJMD sebesar 80%. Jika



dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2019, maka tercapai sebesar 96,81% Sisa capaian kinerja yang harus dicapai tahun-tahun kedepan sebesar 3,19%.

CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN AKHIR RPJMD

Realisasi/Capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebagaimana diurai di atas, akan menjadi outcome terhadap tujuan RPJMD. Indikator tujuan RPJMD merupakan indikator kinerja makro yang akan dicapai pada akhir RPJMD. Adapun target dan realisasi indikator kinerja Tujuan tahun 2019 serta tingkat capaian terhadap akhir RPJMD dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Tujuan/Makro Tahun 2019 Terhadap Akhir
Periode RPJMD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,25	68,31	96,98%
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan Dan Wilayah Kepulauan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	7,28	8,00	91,00%
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,55	75,69	101,14%
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	3,80	6,79	55,96%
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel	Nilai SKM	80,91	95,8	84,46%
6	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	0,6249	0,6455	96,80%
7	Meningkatkan Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Keamanan	88,73	80,2	110,64%
8	Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Dilandasi Dengan Semangat Nasionalisme Dan Kearifan Lokal	Indeks Toleransi	78,49	89,2	87,99%

Berdasarkan tabel di atas kami optimis target indikator kinerja tujuan/makro RPJMD pada akhir periode akan tercapai dengan beberapa alasan diantaranya :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupten Sumenep sampai dengan tahun 2019 sebesar 66,25, sedangkan target akhir RPJMD 68,31



sehingga capaian kinerja terhadap akhir RPJMD sebesar **96,98% (Sangat Berhasil)** atau sisa 3.02%. Capaian IPM Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 3 sasaran yaitu :

- a. Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 83%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 99,61%.
 - c. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 101,94%.
2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan ukuran kualitas atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebesar 76,55% dengan target 7,00 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 104%. Jika dibandingkan dengan target RPJMD capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 91% sehingga sisa target yang harus dicapai sebesar 9%. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 112%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/Perumahan Secara Memadai tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 100,02%.
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebesar 69,06 dengan target 74,45 sehingga capaian kinerja 102,82%. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 1 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 101,30%.
4. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk



kenaikan pendapatan nasional. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebesar 3,80 dari target 6,61 dengan capaian kinerja 57,49%. Capaian Tingkat Pertumbuhan Ekonom Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 8 sasaran yaitu :

- a. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum bisa ditentukan, ini disebabkan indikator Nilai Tukar Nelayan tahun 2019 masih belum dirilis oleh BPS. Untuk Indikator Nilai Tukar Petani capaian Akhir RPJMD sampai dengan tahun 2019 sebesar 87,94%.
- b. Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 73,23%.
- c. Sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 121,76%.
- d. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 115,11%.
- e. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 110,55%.
- f. Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 72,73%.
- g. Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investor tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 228,13%.
- h. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 90,41%.

5. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai SKM Kabupaten Sumenep tahun 2019 sebesar 80,91 dengan target sebesar 91,71 sehingga capaian kinerja sebesar 88,22%. Capaian Tingkat Pertumbuhan Ekonom Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :



- a. Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum dapat dihitung capaian kerjanya. Ini karena ada satu indikator yaitu Peringkat LPPD yang masih belum rilis dari Kemendagri. Untuk Indikator Nilai SAKIP capaian kinerja tahun 2019 sebesar 98% dan Opini BPK capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 115,32%.
6. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun pada tahun 2019 sebesar 0,6249 dari target 0,6255 sehingga capaian kinerja sebesar 99,90%. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 1 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 44,06%.
7. Indeks Keamanan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 73,37 dengan realisasi 88,73 sehingga capaian kinerja yang dapat sebesar 120,93%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 sebesar 110,64 sehingga ada kelebihan target akhir RPJMD sebesar 10,64% dan harus tetap dipertahankan. Capaian Indeks Keamanan Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
- a. Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 93,15%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja masih belum dapat dihitung capaian kerjanya. Ini



karena ada satu indikator yaitu Indeks Pemberdayaan Gender masih belum rilis dari BPS. Untuk Indikator Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak capaian kinerja tahun 2019 sebesar 81,96%.

8. Indeks Toleransi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 78,49 dengan realisasi 83,25 sehingga capaian kinerja yang dapat sebesar 94,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2019 sebesar 87,99% sehingga sisa target akhir RPJMD yang harus dicapai sebesar 12,01%. Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Sumenep didukung dengan keberhasilan 2 sasaran yaitu :
 - a. Sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%.
 - b. Sasaran Meningkatnya Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya tahun 2019 berdasarkan rata-rata realisasi indikator kinerja sebesar 96,81%.
9. Terdapat 7 dari 8 indikator yang sudah tercapai sehingga untuk tahun selanjutnya konsentrasi lebih fokus kepada indikator kinerja yang belum tercapai.
10. Terdapat 1 indikator belum tercapai dan berdasarkan peningkatan kinerja tahun-tahun sebelumnya cukup stabil sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan menghasilkan *impact/outcome* tujuan RPJMD tetap kami laksanakan.
11. Terhadap capaian indikator yang masih tertinggal jauh, kami telah melakukan mitigasi terhadap program/kegiatan yang *impact/outcome* nya kurang signifikan terhadap pencapaian target dengan cara evaluasi program/kegiatan baik sasarannya maupun anggaran yang disediakan serta pengawasan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian kami telah melakukan perubahan baik program/kegiatan, sasaran program/kegiatan maupun anggaran yang disediakan serta sistem pengawasan pelaksanaannya.



E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI.

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.69

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,4	5,46	87,81%	7.631.532.750	6.547.855.303	85,80%	2,01%
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,27	13,19	99,40%	119.368.007.699	99.335.118.460,28	83,22%	16,18%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan adalah sebesar 9,10% dengan rincian indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah tingkat efisiensi sebesar 2,01% dan indikator Angka Harapan Lama Sekolah tingkat efisiensi sebesar 16,18%. Pada Tahun 2019 sasaran meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dicapai dengan **Efisiensi**.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.70

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,14	71,22	99,40%	1.910.899.421	1.248.588.354	65,34%	34,06%



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat adalah sebesar 34,06%, sehingga sasaran ini dicapai dengan **Efisiensi**.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.71

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	19,53 %	19,48%	99,74%	5.730.287.500	3.260.079.298	56,89%	42,85%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,95 %	2,17%	89,86%	1.039.192.000,00	959.470.408,00	92,33%	-2,47%
		Penurunan Masalah Sosial	%	0,45 %	0,45%	100%	679.847.000	575.155.194	84,60%	15,40%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 18,59%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain, Angka Kemiskinan sebesar 42,85%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -2,47% dan indikator Penurunan Masalah Sosial tingkat efisiensi sebesar 15,40%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dicapai dengan **Efisiensi**.

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai berikut :



Tabel 3.72

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN		
(1)	(2)										
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	63%	67,12%	105,85%	159.800.656.542	102.334.476.311	64,04%	41,81%	
		Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	86,11 %	91,92%	106,75%	11.913.200.500	10.183.336.330	85,48%	21,27%	
		Indeks Kinerja Irigasi	%	70,00 %	71,08%	101,54%	13.264.792.000	12.003.656.300	90,49%	11,05%	
		Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan :									
		Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	Orang	309.673	304.161	98,22%	97.612.528.720	26.075.784.152	27%	71,51%	
		Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	Menit	32	35	109,38%	6.626.859.000	6.199.296.526	94%	15,83%	

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah sebesar 32,29%. Sasaran ini di dukung 4 (empat) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 41,81%, Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 21,27%, Indeks Kinerja Irigasi sebesar 11,05% dan Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan yang di tunjang oleh 2 (dua) indikator yaitu Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan tingkat efisiensi 71,51% dan Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan sebesar 15,83%. Pada Tahun 2019 sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dicapai dengan **Efisiensi**.

5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai sebagai berikut :



Tabel 3.73

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100%	82,75%	82,75%	9.193.579.060	8.358.144.946,10	91%	-8,16%
		Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	%	89%	82,75%	92,98%	2.752.290.963	2.510.735.384,82	91%	1,75%
		Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	%	5%	2,80%	178,57%	802.129.750	599.047.858,84	75%	103,89%
		Rasio elektrifikasi	%	60,47	65,22%	107,86%	17.074.700.000	13.478.067.103,57	79%	28,92%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai adalah sebesar 32,29%. Sasaran ini di dukung 4 (empat) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar - 8,16%, Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih sebesar 1,75%, Persentase Penurunan Luas Area Kumuh sebesar 103,89% dan Rasio elektrifikasi sebesar 28.92%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kelestarian Lingkungan sebagai berikut :

Tabel 3.74

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
6	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas air sungai		70,00	67,78	96,83%	706.181.000	672.765.629	95%	1,56%
		Indeks kualitas udara		77,62	88,52	114,04%	953.780.400	940.077.248	99%	15,48%
		Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi		75,42	74,15	98,32%	118.527.500	117.638.000	99%	-0,93%



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Secara Memadai adalah sebesar 5,37%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Indeks kualitas air sungai 1,56%, Indeks kualitas udara sebesar 15,48%, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi sebesar -0,93%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan sebagai berikut :

Tabel 3.75

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
7	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani		101,3	101,4	100,10%	869.250.000	856.247.948	99%	1,59%
		Nilai Tukar Nelayan		105,3	BPS Belum Rilis	-				

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Kesejahteraan Petani dan Nelayan masih belum dapat dihitung karena untuk nilai tukar nelayan tahun 2019 masih belum rilis dari BPS, sedangkan untuk indikator Nilai Tukar Petani tingkat efisiensi sebesar 1,59%, hal ini menunjukkan bahwa indikator Nilai Tukar Petani dicapai dengan **Efisiensi**.

8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan sebagai berikut :



Tabel 3.76

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
8	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi tanaman pangan dan		196.606,77	172.973,09	75,24%	14.174.017.450	13.395.551.441	95%	-19,27%
		Padi	Ton	232.170,1	225.484,59	97,12%				
		Jagung	Ton	440.157,9	434.403,16	98,69%				
		Kedelai	Ton	7.714,6	6.244,01	80,94%	4.833.778.450	4.652.921.054	96%	17,38%
		ubi Kayu	Ton	106.384,5	25.760,60	24,21%				
		Produksi Hasil Perkebunan		13.308,81	14.385,82	113,64%				
		Kelapa	Ton	42.241,2	44.376,40	105,05%	4.775.000.000	4.117.304.400	86%	26,74%
		Tembakau	Ton	8.838,8	8.494,02	96,10%				
		Cabe Jamu	Ton	9.865,3	10.333,80	104,75%				
		Jambu Mente	Ton	4.822,5	7.971,83	165,31%	4.102.322.000	3.749.926.636	91%	96,60%
		siwalan	Ton	776,4	753,04	96,99%				
		Produksi Hasil Peternakan		3.682,052	4.134,586	112,97%				
		Daging (ton)	Ton	4.518,999	4.970,43	109,99%	4.102.322.000	3.749.926.636	91%	96,60%
		Telur (ton)	Ton	2.845,105	3.298,75	115,94%				
		Produksi Hasil Perikanan		782,800	26.382,435	188,01%				
Perikanan Tangkap	Ton	48,600	48.576,86	99,95%	4.102.322.000	3.749.926.636	91%	96,60%		
Perikanan Budidaya	Ton	1.517,00	4.188,01	276,07%						

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan adalah sebesar 30,36%. Sasaran ini di dukung 4 (empat) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Produksi tanaman pangan dan hortikultura sebesar -19,27%, Produksi Hasil Perkebunan sebesar 17,38%, Produksi Hasil Peternakan sebesar 26,74% dan Produksi Hasil Perikanan sebesar 96,60%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan dicapai dengan **Efisiensi**.

9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan sebagai berikut :

Tabel 3.77

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
9	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	77,5	96,8	124,90%	614.958.300	580.893.650	94%	30,44%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan adalah sebesar 30,44%, Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator



yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan dicapai dengan **Efisiensi**.

10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 3.78

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
10	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	0,15%	0,24%	160,00%	4.149.189.050	3.503.412.050	84%	75,56%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	13,30%	7,01%	52,71%	34.859.578.600	23.206.936.261	67%	-13,87%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	6,55 %	9,15%	139,69%	825.830.000	708.931.379	86%	53,85%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan adalah sebesar 36,50%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah sebesar 75,56%, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan sebesar -13,87% dan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian sebesar 53,85%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan dicapai dengan **Efisiensi**.

11. Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM sebagai berikut :



Tabel 3.79

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 11

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
11	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	%	2,98 %	4,5%	151,01%	151.000.500	146.225.500	97%	54%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	%	19 %	7,11%	37,42%	685.090.000	557.268.800	81%	-44%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, Tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM adalah sebesar 5%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Koperasi Sehat sebesar - 54% dan Persentase Pertumbuhan UMKM sebesar -44%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM dicapai dengan **Efisiensi**.

12. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 3.80

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 12

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
12	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%	75 %	75%	100,00%	1.505.928.000	1.128.505.558	75%	25%
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	15 %	9,32%	62,13%	8.321.594.616	7.400.746.878	89%	-27%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata adalah sebesar 2,13%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase Kunjungan Wisatawan sebesar 25% dan Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sebesar -27%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata dicapai dengan **Efisiensi**.



13. Meningkatnya Daya Tarik Investor

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investor sebagai berikut :

Tabel 3.81

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 13

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
13	Meningkatnya Daya Tarik Investor	Jumlah Investor	Orang	6.206	4.260	68,64%	709.307.700	681.697.870	96%	-27%
		Jumlah Nilai Investor	Rp.	449.935.027.958	1.896.914.558.750	421,60%	617.709.600	505.396.875	82%	340%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investor adalah sebesar 156,16%. Sasaran ini di dukung 2 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Jumlah Investor sebesar -27% dan Jumlah Nilai Investor sebesar 340%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investor dicapai dengan **Efisiensi**.

14. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.82

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10,93 %	9,81%	89,75%	1.230.217.500	1.133.706.083	92,15%	-2,40%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Secara Memadai adalah sebesar 32,29%. Sasaran ini di dukung 1(satu) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase



PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar -2,40%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dicapai dengan **Tidak Efisien**.

15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.83

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 15

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
15	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP		BB	B	98%	726.991.000	378.695.342	52,09%	45,68%
		Opini BPK		WTP	WTP	100%	4.897.690.587	2.863.825.107	58,47%	41,53%
		Peringkat LPPD		12	Belum Rilis	-	1.419.620.200	1.389.418.214,71	97,87%	-

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah masih belum bisa dihitung karena indikator Peringkat LPPD tahun 2019 masih belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Sasaran ini didukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Nilai SAKIP dicapai dengan **Efisien** sebesar 45,68%, Opini BPK dicapai dengan **Efisien** sebesar 41,53% dan Peringkat LPPD masih belum dirilis.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah sebagai berikut :



Tabel 3.84

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 16

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(2)									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik :								
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan		2,90	3,25	112,07%	92.350.000	74.238.153	80,39%	31,68%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran /Kematian		82,00	85,00	103,66%	1.342.932.000	1.081.605.000	80,54%	23,12%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo		78,00	85,00	108,97%	4.825.399.237	4.655.113.108	96,47%	12,50%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan		91,00	4,36	4,79%	945.903.000	834.404.462	88,21%	-83,42%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan		78,00	82,23	105,42%	3.505.024.750	3.346.445.284	95,48%	9,95%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan		74,00	76,96	104,00%	22.615.874.800	14.648.506.432	64,77%	39,23%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM		83,00	85,25	102,71%	1.538.982.690	1.504.710.655	97,77%	4,94%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat		83,00	85,25	102,71%	2.900.773.900	2.570.080.555	88,60%	14,11%
	Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang		80,00	85,33	106,66%	1.537.015.500	1.388.670.242	90,35%	16,31%
	E-Government :								
	Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government		31	75	241,94%	2.001.820.000	1.988.801.255	99,35%	142,59%
	Jumlah OPD Yang Telah Terintrogasi E-Government nya secara keseluruhan		31	75	241,94%	1.389.000.000	1.324.958.153	95,39%	146,55%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah adalah sebesar 32,50%. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Nilai SKM unit-unit Layanan Publik sebesar 7,60% dan E-Government sebesar 144,57 %. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dicapai dengan **Efisiensi**.

17. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial sebagai berikut :



Tabel 3.85

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 17

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
17	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	Persentase BUMDes Yang Sehat	%	49,00%	1,52%	3,10%	514.375.000	347.958.570	67,65%	-64,54%
		Persentase Desa Mandiri	%	0,00%	0,00%	100,00%	5.346.957.825	4.312.277.859	80,65%	19,35%
		Persentase Desa Tertinggal	%	36,06%	30,30%	84,03%	648.105.000	578.739.212	89,30%	-5,26%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial adalah sebesar -16,82%. Sasaran ini di dukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Persentase BUMDes Yang Sehat sebesar -64,54%, Persentase Desa Mandiri sebesar 19,35%, dan Persentase Desa Tertinggal sebesar -5,32%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial dicapai dengan **Efisiensi**.

18. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.86

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 18

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
18	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	%	100 %	93,15%	93,15%	648.105.000	578.739.212	89,30%	3,85%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Secara Memadai adalah sebesar 3,85%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) sebesar 3,85%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Memadai dicapai dengan **Efisiensi**.

19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

Tabel 3.87

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 19

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
19	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender		100 %	BPS Belum Rilis	-	847.300.000	733.710.400	86,59%	-
		Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak		917,18 Skor	909,6	99,17%	8.955.579.000	6.016.082.250	67,18%	32,00%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak masih belum bisa dihitung karena indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019 masih belum dirilis oleh BPS. Sasaran ini di dukung 2 (dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Indeks Pemberdayaan Gender masih belum rilis dan Nilai/Peringkat Kabupaten Layak Anak dicapai dengan **Efisiensi** sebesar 32 %.

20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama sebagai berikut :



Tabel 3.88

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 20

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
20	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	100%	100%	100%	1.029.739.500	976.509.630	94,83%	5,17%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama adalah sebesar 5,17%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial sebesar 5,17%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama dicapai dengan **Efisiensi**.

21. Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya sebagai berikut :

Tabel 3.89

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 21

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)									
21	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya	Indeks Pelestarian Seni dan Budaya		75 %	77,45%	103,27%	4.702.205.000	4.344.690.977	92,40%	10,87%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya adalah sebesar 10,87%. Sasaran ini di dukung 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelestarian Seni dan Budaya sebesar 10,87%. Pada Tahun 2019 sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya dicapai dengan **Efisiensi**.



F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Adapun Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan didukung dengan Program dan Kegiatan diantaranya Peningkatan Akses PAUD, Peningkatan Akses Sekolah Dasar (SD), Peningkatan Akses SMP, Peningkatan Akses PNF, Peningkatan Kualitas PAUD, Peningkatan Kualitas SD, Peningkatan Kualitas SMP, Peningkatan Kualitas PNF, Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Kualifikasi akademik PTK.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diantaranya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pembinaan Lingkungan Sosial, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Upaya Kesehatan Puskesmas, Sumber Daya Kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Upaya Kesehatan Perorangan, Pembinaan Lingkungan Sosial, Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat diantaranya Peningkatan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCT), Pelatihan Keterampilan Kerja, Penempatan dan Pemberdayaan



Transmigrasi, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT, Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

4. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya Kualitas Infrastruktur diantaranya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Inspeksi Kondisi Jalan, Tanggap Darurat Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Tanggap Darurat Jembatan, Infrastruktur Keirigasian, Pemeliharaan, Penyediaan Air Baku Dan Pengendalian Daya Rusak Air, Penyediaan dan Pengelolaan Data Serta Pemanfaatan Sumber Daya Air, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Perencanaan Penataan Ruang, Penataan Bangunan Gedung, Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana, Pengembangan Sistem/Lingkungan dan Keselamatan Transportasi, Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai diantaranya Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman.

6. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kelestarian lingkungan diantaranya Penaatan Hukum, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Inventarisasi Data dan Informasi, Penataan Lingkungan, Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam, Penataan Laboratorium Lingkungan, Penataan TPA,



Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air, Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara.

7. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan diantaranya Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT), Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan.

8. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya produksi pertanian dan perikanan diantaranya Produksi Pertanian, Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT), Produksi Perkebunan, Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pembinaan Lingkungan Sosial.

9. Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya konsumsi pangan dan keragaman pangan diantaranya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Produksi Peternakan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

10. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya saing sektor industri dan perdagangan diantaranya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Pembinaan Industri, Pembinaan Lingkungan Sosial, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Promosi dan Kerja sama Perdagangan, Pemberantasan Barang Kena Cukai, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.



11. Meningkatkan Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya saing sektor koperasi dan UMKM diantaranya Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam, Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi, Peningkatan Usaha Mikro, Pembinaan Lingkungan Sosial.

12. Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya tarik pariwisata diantaranya Pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan destinasi pariwisata, pengawasan kepariwisataan dan Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata.

13. Meningkatkan Daya Tarik Investor

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya daya tarik investor diantaranya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, Pengembangan Data/ Informasi, Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan, Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan.

14. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah diantaranya Pengembangan Potensi PAD, Administrasi Perbendaharaan Daerah, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penatausahaan dan Tata Kelola Administrasi Aset, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan.

15. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah diantaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan disiplin ASN, Pengelolaan Administrasi Mutasi



ASN, Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN, Pengembangan Kompetensi SDM, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan, Pengembangan data/informasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Daerah, Fasilitasi pembinaan keagamaan, pendidikan, kepemudaaan, kesehatan, dan kemasyarakatan, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Layanan Dokumentasi, Pemberitaan Pembangunan dan keprotokolan, Penataan Produk hukum yang berkualitas, Optimalisasi Informasi Hukum dan pengawalan kasus hukum, Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah, Penataan Kelembagaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Organisasi Perangkat Daerah, Fasilitasi dan Penataan Prosedur Sistem Kebijakan Pelayanan Publik, Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Bidang energi dan sumber daya alam.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah diantaranya Pelayanan Informasi Data Kepegawaian, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, pengembangan informasi, Komunikasi dengan media massa, Pengelolaan dan pemanfaatan informasi dengan Media massa, Pemanfaatan sarana dan prasarana TIK, Persandian Daerah, pengembangan data statistik, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik, Rehabilitasi dan rekonstruksi, Budaya baca, pembinaan, pengolahan dan pengembangan



perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD, Fasilitasi penyusunan dan penyajian data produk hukum DPRD, Fasilitasi kegiatan rapat dan penyusunan risalah hasil rapat DPRD.

17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial diantaranya Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

18. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perempuan di Perdesaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk.

19. Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak diantaranya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Perempuan di Perdesaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Keluarga Berencana, Program Pengendalian Penduduk.



20. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat Beragama

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama diantaranya ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan HAM.

21. Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya

Program dan kegiatan yang mendukung meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya diantaranya pengelolaan keragaman seni dan budaya, peningkatan peran serta kepemudaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.



BAB
IV

PENUTUP

Atas berkat, rahmat dan ridho Allah SWT, dengan dukungan dari seluruh pihak, partisipasi serta bantuan masyarakat maupun swasta dalam mendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2019 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Meskipun terdapat beberapa target capaian indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan, namun secara umum apa yang diinginkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan **“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”** seperti ditegaskan dalam Visi RPJMD Kabupaten Sumenep 2016- 2021 secara bertahap dapat dicapai.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini tidak berarti kinerja pemerintahan telah berjalan secara baik dan lancar tanpa adanya suatu hambatan dan kendala. Kendala/hambatan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu adanya solusi pemecahan. Berkat bantuan semua *stakeholders* dan dilandasi oleh semangat, kerja keras, serta etos kerja untuk membangun, maka berbagai permasalahan yang ada akan dapat diatasi.

Akhirnya semoga laporan ini dapat menjadi bahan/informasi bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Semoga pada tahun mendatang kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat semakin ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan melalui cerminan capaian serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat



memenuhi target, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat, maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2019 akan selalu kami pantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terus menerus sehingga tidak berhenti dalam tataran kebijakan formal saja, tetapi menjadi program dan kegiatan yang menjadial awal dan tumpuan pelaksanaan penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan dan lebih utamanya penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Langkah-langkah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga terwujud keselarasan dalam perencanaan daerah;
2. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil;
3. Dibangun sistem pengumpulan data kinerja

Harapan kami dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep ini, bukan hanya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah menjadi komitmen di Tahun 2019, namun dapat mencerminkan pula keselarasan dan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya mencerminkan secara utuh penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

I N S P E K T O R A T

Jl. Kamboja No. 31 Telp. (0328) 662080

S U M E N E P

Kode Pos 69417

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkIP) KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sumenep, 31 Maret 2020

**INSPEKTUR KABUPATEN
SUMENEP**



R. TITIK SURYATI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660409 199302 2 002

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check List		
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Sumenep, 21 Maret 2020



INSPEKTUR
KABUPATEN SUMENEP
INSPEKTORAT
R. TITIK SURYATI, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660409 199302 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BUPATI SUMENEP

VISI : SUPER MANTAP

Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil Dan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN			
Tujuan 1.1. : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
1.1.1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1.1.1.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,4 tahun
		1.1.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,27 tahun
1.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,14 tahun
1.1.3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1.1.3.1. Angka Kemiskinan	19,53 %
		1.1.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	1,95 %
		1.1.3.3. Penurunan Masalah Sosial	0,45 %
MISI 2 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN DAN DARATAN YANG DIDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM S LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN			
Tujuan 2.1. : Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dan Jaringan Transportasi Di Daratan Dan Wilayah Kepulauan			
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur			
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	2.1.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	63,41 %
		2.1.1.2. Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	86,11 %
		2.1.1.3. Indeks Kinerja Irigasi	70,00 %
		2.1.1.4. Persentase Aksesibilitas Wilayah Kepulauan dan Daratan	
		a. Kapasitas Layanan Angkutan Kepulauan	309.673 Orang
		b. Headway Rata-rata Angkutan Pedesaan	32 Menit
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	2.1.2.1. Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%
		2.1.2.2. Persentase jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	89%
		2.1.2.3. Persentase Penurunan Luas Area Kumuh	5%
		2.1.2.4. Rasio elektrifikasi	60,47
Tujuan 2.2. : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
2.2.1.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	2.2.1.1. Indeks kualitas air sungai	70.00
		2.2.1.2. Indeks kualitas udara	77.62
		2.2.1.3. Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi	75.42
MISI 3 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN PEDESAAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MEMBERDAYAKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG UNGGUL BERDAYA SAING TINGGI			
Tujuan 3.1. : Meningkatkan Perekonomian Daerah			
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi			
3.1.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	3.1.1.1. Nilai Tukar Petani	101,3 skor
		3.1.1.2. Nilai Tukar Nelayan	105,3 skor
3.1.2.	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	3.1.2.1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura :	IKU
		- Padi	232,170.12 ton
		- Jagung	440,157.90 ton
		- Kedelai	7,714.56 ton
		- ubi Kayu	106,384.50 ton
		3.1.2.2. Produksi Hasil Perkebunan :	IKU
		- Kelapa	42,241.18 ton
		- Tembakau	8,838.75 ton
		- Cabe Jambu	9,865.28 ton
		- Jambu Mente	4,822.48 ton
		- siwalan	776,37 ton
		3.1.2.3. Produksi Hasil Peternakan :	
		- Daging (ton)	4.518,999 ton
		- Telur (ton)	2.845,105 ton
		3.1.2.4. Jumlah Produksi Hasi Perikanan (ton)	50.117 ton
		- Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	1.517 ton

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.3.	Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	3.1.3.1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah nilai investasi penanaman modal:	77,5
3.1.4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	3.1.4.1. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	15 %
		3.1.4.2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	13,30 ton
		3.1.4.3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	6,55 %
3.1.5.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi dan UMKM	3.1.5.1. Persentase Koperasi Sehat	2,98 %
		3.1.5.2. Persentase Pertumbuhan UMKM	19 %
3.1.6.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	3.1.6.1. Persentase Kunjungan Wisatawan	75 %
		3.1.6.2. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	15 %
3.1.7.	Meningkatnya Daya Tarik Investor	3.1.7.1. Jumlah Investor	2.500 orang
		3.1.7.2. Jumlah Nilai Investor	Rp 449,935,027,958
3.1.8.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	3.1.8.1. Persentase PAD terhadap APBD	10,93 %
MISI 4 : MENINGKATKAN KULTUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL			
Tujuan 4.1. : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel			
Nilai SKM			
4.1.1.	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.1.1. Nilai SAKIP	B
		4.1.1.2. Opini BPK	WTP
		4.1.1.3. Peringkat LPPD	12
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	4.1.2.1. Nilai SKM Unit-unit Layanan Publik	
		- Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan	2,9
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian	82
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Bidang Kominfo	78
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Perpustakaan	91
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Kecamatan	78
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Sekretariat Dewan	74
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BKPSDM	83
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Diklat	83
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan Litbang	80
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan BPPD	80
		- Nilai SKM Unit-unit Layanan RSUD	86
		4.1.2.2. E-Government	
- Jumlah OPD Yang Telah Menyelenggarakan E-Government	31 unit		
- Jumlah OPD Yang Telah Terintegrasi E-Government nya secara keseluruhan	31 unit		
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN DAN KONDUSIF MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA			
STAKEHOLDER DALAM PROSES PEMBANGUNAN			
Tujuan 5.1. : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa			
Indek Desa Membangun			
5.1.1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial	5.1.1.1. Persentase BUMDes Yang Sehat	4,9 %
		5.1.1.2. Persentase Desa Mandiri	0 %
		5.1.1.3. Persentase Desa Tertinggal	36,06%
Tujuan 5.2. : Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat			
Indek Keamanan			
5.2.1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5.2.1.1. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)	100 %
		5.2.2.1. Indeks Pemberdayaan Gender	100 %
5.2.2.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	5.2.2.2. Nilai/Peningkatan Kabupaten Layak Anak	917,18 Skor
		MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN BUDAYA SERTA NASIONALISME YANG DIDUKUNG KEARIFAN LOKAL DALAM KEHIDUPAN	
BERMASYARAKAT			
Tujuan 6.1. : Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama Yang Dilandasi Dengan Semangat Nasionalisme dan Kearifan Lokal			
Indeks Toleransi			
6.1.1.	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi Antar Umat	6.1.1.1. Persentase penurunan konflik sosial	0,36%
		6.1.2.1. Indeks Pelestarian Seni dan Budaya	75 %
6.1.2.	Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya		IKU

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I	URUSAN URUSAN WAJIB	864.096.751.963	1.055.586.776.014	
1.1.	PENDIDIKAN	131.623.150.065	127.583.311.699	
1.1.1.	DINAS PENDIDIKAN	131.623.150.065	127.583.311.699	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	4.493.922.160	3.917.415.160	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	119.877.500	119.877.500	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730.000.090	1.326.000.090	
	- Program Peningkatan Akses PAUD	1.413.033.000	1.413.033.000	
	- Program Peningkatan Akses SD	36.856.213.000	36.121.823.000	
	- Program Peningkatan Akses SMP	10.257.872.000	7.768.902.002	
	- Program Peningkatan Akses PNF	1.024.730.000	309.613.000	
	- Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	11.650.887.000	12.879.357.000	
	- Program Peningkatan Kualitas PAUD	124.055.000	186.555.000	
	- Program Peningkatan Kualitas SD	49.897.872.259	48.958.022.258	
	- Program Peningkatan Kualitas SMP	14.708.311.056	13.861.342.689	
	- Program Peningkatan Kualitas PNF	95.920.000	470.914.000	
	- Program kualifikasi akademik PTK	250.457.000	250.457.000	
1.2.	KESEHATAN	269.749.818.537	323.793.702.924	
1.2.1.	DINAS KESEHATAN	172.613.153.237	214.621.482.237	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.462.633.000	2.361.468.000	
	- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	84.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.518.000	279.518.000	
	- Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	4.199.999.000	4.263.999.000	
	- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	909.455.300	1.300.484.300	
	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	200.000.000	425.238.621	
	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1.230.080.234	1.187.930.234	
	- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	55.752.740.000	67.331.194.978	
	- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2.959.922.531	8.299.988.206	
	- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	3.000.000.000	19.500.000.000	
	- Program Upaya Kesehatan Puskesmas	73.980.216.347	70.675.798.610	
	- Program Sumber Daya Kesehatan	13.101.303.500	14.414.729.643	
	- Pembinaan Lingkungan Sosial	15.537.285.325	24.497.132.645	
1.2.2.	RSUD. H. MOH ANWAR	97.136.665.300	109.172.220.687	
	- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	92.686.666.300	96.829.111.687	
	- Pembinaan Lingkungan Sosial	3.000.000.000	6.623.110.000	
	- Program Upaya Kesehatan Perorangan	-	4.270.000.000	
	- Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah	1.449.999.000	1.449.999.000	
1.3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	276.646.081.168	338.616.452.373	
1.3.1.	DINAS PU BINA MARGA	121.465.164.472	170.328.089.042	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.362.397.000	2.810.732.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	69.010.000	84.010.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.365.000	11.405.000	
	- Program Pembangunan Jalan	91.655.200.472	120.744.713.855	
	- Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	17.470.467.000	33.672.262.687	
	- Program Inspeksi Kondisi Jalan	164.680.000	164.680.000	
	- Program Tanggap Darurat Jalan	205.964.500	205.964.500	
	- Program Pembangunan Jembatan	8.787.960.000	11.913.200.500	
	- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	415.156.000	415.156.000	
	- Program Tanggap Darurat Jembatan	305.964.500	305.964.500	
1.3.2.	DINAS PU SUMBER DAYA AIR	28.598.972.000	36.297.472.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.279.150.000	1.279.150.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70.000.000	70.000.000	
	- Program Infrastruktur Keirigasian	11.633.892.000	13.264.792.000	
	- Program Pemeliharaan, Penyediaan Air Baku Dan Pengendalian Daya Rusak Air	13.149.320.000	18.644.920.000	
	- Program Penyediaan dan Pengolahan Data Serta Pemanfaatan Sumber Daya Air	2.466.610.000	3.038.610.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.3.3.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	126.581.944.696	131.990.891.331	
	- Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	6.285.904.000	7.141.415.000	
	- Program Perencanaan Penataan Ruang	697.458.500	415.253.500	
	- Program Penataan Bangunan Gedung	119.598.582.196	124.434.222.831	
1.4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	22.318.792.869	19.474.498.699	
1.4.1.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	22.318.792.869	19.474.498.699	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.827.351.139	3.147.551.139	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000	50.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.447.750	100.447.750	
	- Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	19.340.993.980	16.176.499.810	
1.5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.666.656.403	5.583.565.403	
1.5.1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.300.000.000	2.755.796.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	683.410.000	856.111.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	48.855.000	48.855.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.620.000	19.620.000	
	- Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	519.380.000	648.105.000	
	- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	350.000.000	350.000.000	
	- Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	678.735.000	833.105.000	
1.5.2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.366.656.403	2.827.769.403	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	807.366.400	807.366.400	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.500.000	7.500.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.800.000	9.800.000	
	- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.290.890.003	1.553.140.003	
	- Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik	161.100.000	359.963.000	
	- Program Rehabilitasi dan rekonstruksi	90.000.000	90.000.000	
1.6.	SOSIAL	9.459.498.400	7.411.964.500	
1.6.1.	DINAS SOSIAL	9.459.498.400	7.411.964.500	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	905.000.000	961.830.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40.000.000	40.000.000	
	- Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya	6.801.298.400	4.165.460.500	
	- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	367.000.000	463.147.000	
	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	384.718.000	622.118.000	
	- Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	265.282.000	390.659.000	
	- Program Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	375.322.000	431.172.000	
	- Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	120.878.000	120.878.000	
	- Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT	200.000.000	216.700.000	
1.7.	TENAGA KERJA	3.669.434.000	3.728.734.000	
1.7.1.	DINAS TENAGA KERJA	3.669.434.000	3.728.734.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	698.920.000	698.920.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	10.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.548.000	22.548.000	
	- Program Peningkatan Kesempatan Kerja	286.360.000	286.360.000	
	- Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	113.640.000	113.640.000	
	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	473.532.000	532.832.000	
	- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	220.000.000	220.000.000	
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.719.434.000	1.719.434.000	
	- Program Pelatihan Keterampilan Kerja	125.000.000	125.000.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.715.000.000	1.784.500.000	
1.8.1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1.715.000.000	1.784.500.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	861.530.000	890.730.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.700.000	32.700.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.000	13.770.000	
	- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	207.000.000	207.000.000	
	- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	600.000.000	640.300.000	
1.9.	PANGAN	8.149.958.300	10.564.958.300	
1.9.1.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	8.149.958.300	10.564.958.300	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	565.298.000	1.705.298.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	10.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.702.000	91.702.000	
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	940.000.000	940.000.000	
	- Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	614.958.300	614.958.300	
	- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	2.078.000.000	2.078.000.000	
	- Program Peningkatan Produksi Peternakan	3.540.000.000	4.775.000.000	
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	350.000.000	350.000.000	
1.10.	LINGKUNGAN HIDUP	13.655.276.539	17.625.321.539	
1.10.1.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.655.276.539	17.625.321.539	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	978.272.439	1.289.424.939	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000	65.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.800.000	61.800.000	
	- Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	7.116.785.700	10.348.973.200	
	- Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air	319.286.500	319.286.500	
	- Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara	43.997.000	43.997.000	
	- Program Penuaan Hukum	91.993.000	91.993.000	
	- Program Peningkatan Kapasitas	461.112.500	668.712.500	
	- Program Inventarisasi Data dan Informasi	135.922.000	135.922.000	
	- Program Pemeliharaan Lingkungan	740.678.400	909.783.400	
	- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	118.527.500	118.527.500	
	- Program Penataan Laboratorium Lingkungan	294.901.500	294.901.500	
	- Program Penataan TPA	3.277.000.000	3.277.000.000	
1.11.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.177.371.000	8.725.718.800	
1.11.1.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.177.371.000	8.725.718.800	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.448.724.500	2.037.622.300	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	83.202.000	120.652.000	
	- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.958.082.000	5.832.082.000	
	- Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	37.098.500	37.098.500	
	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	509.689.000	554.689.000	
	- Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	140.575.000	143.575.000	
1.12.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.149.406.128	23.962.492.528	
1.12.1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	19.149.406.128	23.962.492.528	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	561.234.703	1.026.459.703	
	- Program Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk kawasan pemukiman/perumahan	11.400.000.000	17.074.700.000	
	- Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	80.000.000	80.000.000	
	- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	361.224.000	687.080.000	
	- Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	1.735.191.500	1.775.191.500	
	- Program peningkatan kapasitas pemerintahan desa	4.475.880.925	2.804.686.325	
	- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	535.875.000	514.375.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.13.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.312.314.400	9.322.314.400	
1.13.1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	9.312.314.400	9.322.314.400	
	- Program Keluarga Berencana	1.333.072.000	1.333.072.000	
	- Program Pembangunan Keluarga	366.735.400	366.735.400	
	- Program Pengendalian Penduduk	7.612.507.000	7.622.507.000	
1.14.	PERHUBUNGAN	60.581.268.929	125.638.092.024	
1.14.1.	DINAS PERHUBUNGAN	60.581.268.929	125.638.092.024	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	18.980.309.929	21.347.649.604	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11.090.750	21.090.750	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.715.050	29.963.950	
	- Program Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana	249.609.700	549.104.820	
	- Program Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	35.185.376.500	97.063.423.900	
	- Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	242.867.000	690.757.000	
	- Program Pengembangan Sistem/Lingkungan dan Keselamatan Transportasi	5.862.500.000	5.936.102.000	
1.15.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.027.970.000	8.816.290.000	
1.15.1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.027.970.000	8.816.290.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.088.340.000	1.217.340.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	16.000.000	16.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.000.000	153.000.000	
	- Program pengembangan informasi, Komunikasi dengan media massa	230.000.000	230.000.000	
	- Program Pengolahan dan pemanfaatan informasi dengan Media massa	1.927.995.000	2.327.995.000	
	- Program Pemanfaatan sarana dan prasarana TIK	4.612.635.000	4.871.955.000	
1.16.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.908.842.225	7.548.842.225	
1.16.1.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	6.908.842.225	7.548.842.225	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	708.000.000	977.800.000	
	- Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam	200.000.000	282.434.700	
	- Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	150.000.000	151.000.500	
	- Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	140.000.000	201.759.800	
	- Program Peningkatan Usaha Mikro	433.085.000	658.090.000	
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.277.757.225	5.277.757.225	
1.17.	PENANAMAN MODAL	2.410.000.000	3.361.512.100	
1.17.1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.410.000.000	3.361.512.100	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	713.481.100	692.881.100	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	27.500.000	10.400.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.852.000	50.852.000	
	- Program Promosi dan Kerjasama Investasi	387.900.000	537.900.000	
	- Program Pengembangan Data/Informasi	171.407.700	171.407.700	
	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Perizinan	305.058.000	305.058.000	
	- Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	171.439.500	312.651.600	
	- Program Pelayanan Administrasi Perizinan	582.361.700	1.280.361.700	
1.18.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.080.875.000	2.573.413.500	
1.18.1.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.080.875.000	2.573.413.500	
	- Program peningkatan peran serta kepemudaan	254.878.000	1.193.348.000	
	- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	825.997.000	1.380.065.500	
1.19.	STATISTIK	155.230.000	345.230.000	
1.19.1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	155.230.000	345.230.000	
	- Program Statistik Daerah	155.230.000	345.230.000	
1.20.	PERSANDIAN	16.800.000	43.980.000	
1.20.1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.800.000	43.980.000	
	- Program Persandian Daerah	16.800.000	43.980.000	
1.21.	KEBUDAYAAN	4.313.313.000	6.520.518.000	
1.21.1.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.313.313.000	6.520.518.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.638.563.000	1.793.563.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	14.950.000	14.950.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.800.000	9.800.000	
	- Program pengelolaan keragaman seni dan budaya	2.650.000.000	4.702.205.000	
1.22.	PERPUSTAKAAN	1.709.695.000	1.961.363.000	
1.22.1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.709.695.000	1.961.363.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	872.060.000	983.560.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	38.900.000	31.900.000	
	- Budaya baca, pembinaan, pengolahan dan pengembangan perpustakaan	798.735.000	945.903.000	
1.23.	KEARSIPAN	600.000.000	600.000.000	
1.23.1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	600.000.000	600.000.000	
	- Penyelenggaraan Kearsipan	600.000.000	600.000.000	
II	URUSAN PILIHAN	66.490.422.778	74.367.041.416	
2.1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.659.217.200	8.855.032.200	
2.1.1.	DINAS PERIKANAN	6.659.217.200	8.855.032.200	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	815.879.000	1.106.448.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	59.000.000	59.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.121.000	15.121.000	
	- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan	1.113.955.200	1.227.911.200	
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial	350.000.000	350.000.000	
	- Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan	375.000.000	438.230.000	
	- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.137.762.000	4.102.322.000	
	- Program Pengembangan Budidaya Perikanan	792.500.000	1.556.000.000	
2.2.	PARIWISATA	7.056.377.078	8.192.222.116	
2.2.1.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.056.377.078	8.192.222.116	
	- Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.225.928.900	1.505.928.900	
	- Program pengembangan destinasi pariwisata, pengawasan kepariwisataan dan Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata	5.830.448.178	6.686.293.216	
2.3.	PERTANIAN	15.804.017.450	16.286.017.450	
2.3.1.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	15.804.017.450	16.286.017.450	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.198.040.000	1.056.790.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000	15.000.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.960.000	170.960.000	
	- Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	265.000.000	569.250.000	
	- Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	300.000.000	300.000.000	
	- Program Produksi Pertanian	435.000.000	435.000.000	
	- Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	8.574.239.000	8.905.239.000	
	- Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)	4.453.778.450	4.453.778.450	
	- Program Produksi Perkebunan	380.000.000	380.000.000	
2.4.	PERDAGANGAN	33.938.410.000	34.859.578.600	
2.4.1.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	33.938.410.000	34.859.578.600	
	- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	33.209.169.500	33.620.664.100	
	- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	193.947.500	288.987.500	
	- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	318.733.000	530.433.000	
	- Program Promosi dan Kerja Sama Perdagangan	154.560.000	357.494.000	
	- Program Pemberantasan Barang Kena Cukai	62.000.000	62.000.000	
2.5.	PERINDUSTRIAN	3.032.401.050	6.174.191.050	
2.5.1.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.032.401.050	6.174.191.050	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	945.838.500	1.007.308.500	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	169.500.000	181.500.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.363.500	10.363.500	
	- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	966.729.050	4.149.189.050	
	- Program Lingkungan Sosial	330.745.000	401.745.000	
	- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	390.225.000	276.085.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	- Program Pembinaan Industri	219.000.000	148.000.000	
III	URUSAN ADMINSTRASI DAN FUNGSI	103.915.651.626	128.060.327.313	
3.1.	SEKRETARIAT DAERAH	30.174.343.700	35.004.493.987	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	13.042.119.050	15.918.644.537	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.400.000	71.353.800	
	- Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Daerah	1.228.895.200	1.419.620.200	
	- Penataan Produk hukum yang berkualitas	206.736.800	238.736.800	
	- Optimalisasi Informasi Hukum dan pengawasan kasus hukum.	1.985.951.000	1.951.501.900	
	- Fasilitasi pembinaan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kesehatan, dan kemasyarakatan	3.295.318.800	3.295.318.800	
	- Fasilitasi Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2.376.297.000	2.484.437.000	
	- Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.142.127.000	1.202.127.000	
	- Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	1.387.603.000	1.744.544.000	
	- Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Bidang energi dan sumber daya alam	847.140.000	882.240.000	
	- Penataan Kelembagaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Organisasi Perangkat Daerah	406.610.000	569.355.900	
	- Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	494.991.000	726.991.000	
	- Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	400.000.000	400.000.000	
	- Program Peningkatan Layanan Dokumentasi, Pemberitaan Pembangunan dan Keprotokolan	1.585.675.950	1.972.807.950	
	- Program Fasilitasi dan Panataan Prosedur Sistem Kebijakan Pelayanan Publik	350.478.400	653.814.600	
	- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.373.000.500	1.473.000.500	
3.2.	SEKRETARIAT DPRD	28.920.782.119	35.632.080.819	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	4.678.894.019	6.616.562.151	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	160.228.000	259.052.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	525.295.200	547.814.868	
	- Program Fasilitasi kegiatan rapat dan penyusunan risalah rapat DPRD	10.262.528.400	13.211.771.800	
	- Program Fasilitasi penyusunan dan penyajian data produk hukum DPRD	9.480.503.000	9.404.103.000	
	- Program Penyerapan aspirasi masyarakat dan publikasi kegiatan DPRD	3.813.333.500	5.592.777.000	
3.3.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.820.515.500	2.280.515.500	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	463.154.500	569.433.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8.000.000	8.000.000	
	- Program ideologi, Wawasan, ketahanan bangsa dan HAM	316.237.000	316.237.000	
	- Program pendidikan politik masyarakat	357.106.000	357.106.000	
	- Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	676.018.000	1.029.739.500	
3.4.	KECAMATAN	13.553.046.550	16.993.624.800	
3.4.1.	KECAMATAN KOTA SUMENEP	3.100.207.500	792.828.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.703.110.350	449.396.063	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18.600.000	-	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.378.497.150	90.115.000	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Bangselok	-	61.807.910	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Karangduak	-	67.940.460	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Kepanjin	-	60.846.817	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Pajagalan	-	62.721.750	
3.4.2.	KECAMATAN KALIANGET	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	241.895.000	241.895.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	14.950.000	14.950.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	143.155.000	193.155.000	
3.4.3.	KECAMATAN TALANGO	375.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	246.948.400	296.948.400	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	128.051.600	128.051.600	
3.4.4.	KECAMATAN MANDING	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	263.709.500	288.709.500	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.125.000	28.125.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	108.165.500	108.165.500	
3.4.5.	KECAMATAN BLUTO	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	215.965.500	215.965.500	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	39.150.000	39.150.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	144.884.500	194.884.500	
3.4.6.	KECAMATAN SARONGGI	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	282.254.000	332.570.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	117.746.000	117.430.000	
3.4.7.	KECAMATAN LENTENG	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	217.202.000	249.612.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.000.000	15.000.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	167.798.000	185.388.000	
3.4.8.	KECAMATAN GILIGENTENG	415.000.000	440.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	280.603.000	280.603.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	5.612.000	5.612.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	128.785.000	153.785.000	
3.4.9.	KECAMATAN GULUK_GULUK	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	278.934.000	300.934.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15.660.000	15.660.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	105.406.000	108.406.000	
3.4.10.	KECAMATAN GANDING	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	262.172.600	262.172.600	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8.750.000	8.750.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	129.077.400	154.077.400	
3.4.11.	KECAMATAN PRAGAAN	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	275.116.000	325.116.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.300.000	32.300.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	92.584.000	92.584.000	
3.4.12.	KECAMATAN RUBARU	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	274.016.500	274.016.500	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23.800.000	23.800.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	102.183.500	152.183.500	
3.4.13.	KECAMATAN AMBUNTEN	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	260.976.000	285.976.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000	24.000.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	115.024.000	115.024.000	
3.4.14.	KECAMATAN PASONGSONGAN	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	237.669.000	251.009.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9.800.000	9.800.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.052.000	12.052.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	140.479.000	152.139.000	
3.4.15.	KECAMATAN DASUK	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	262.410.000	262.410.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9.200.000	9.200.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	128.390.000	153.390.000	
3.4.16.	KECAMATAN BATANG_BATANG	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	268.820.000	369.962.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22.500.000	20.550.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	108.680.000	59.488.000	
3.4.17.	KECAMATAN BATUPUTIH	400.000.000	450.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	280.278.950	280.278.950	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.500.000	12.500.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	107.223.050	157.223.050	
3.4.18.	KECAMATAN GAPURA	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	255.270.000	313.650.400	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12.800.000	11.600.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	131.930.000	99.749.600	
3.4.19.	KECAMATAN DUNGKEK	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	278.946.700	293.504.700	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	14.800.000	14.800.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.558.000	-	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	101.695.300	116.695.300	
3.4.20.	KECAMATAN GAYAM	400.000.000	425.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	281.770.000	281.770.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.200.000	28.200.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	90.030.000	115.030.000	
3.4.21.	KECAMATAN NONGGUNONG	423.188.300	473.188.300	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	245.668.300	265.103.300	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18.900.000	18.900.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	158.620.000	189.185.000	
3.4.22.	KECAMATAN RAAS	415.000.000	465.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	264.066.700	264.066.700	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	26.600.000	26.600.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	124.333.300	174.333.300	
3.4.23.	KECAMATAN MASALEMBU	415.000.000	440.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	297.471.000	322.471.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18.975.000	18.975.000	

NO.	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	98.554.000	98.554.000	
3.4.24.	KECAMATAN ARJASA	415.000.000	440.000.000	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	288.205.000	313.205.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.900.000	28.900.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	97.895.000	97.895.000	
3.4.25.	KECAMATAN SAPEKEN	420.237.800	445.237.800	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	267.851.800	339.203.800	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	28.750.000	28.750.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	103.636.000	77.284.000	
3.4.26.	KECAMATAN BATUAN	393.370.500	418.370.500	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	289.136.500	314.136.500	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	104.234.000	104.234.000	
3.4.27.	KECAMATAN KANGAYAN	381.042.450	406.042.450	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	269.467.450	269.467.450	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000.000	20.000.000	
	- Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	91.575.000	116.575.000	
3.4.28.	KELURAHAN BANGSELOK	-	1.210.438.000	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Bangselok	-	83.075.000	
	- Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangselok	-	680.415.000	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangselok	-	446.948.000	
3.4.29.	KELURAHAN KARANGDUAK	-	1.201.173.750	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Karangduak	-	73.810.750	
	- Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangduak	-	696.170.000	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangduak	-	431.193.000	
3.4.30.	KELURAHAN KEPANJIN	-	1.208.503.000	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Kepanjin	-	81.140.000	
	- Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Kepanjin	-	702.820.000	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepanjin	-	424.543.000	
3.4.31.	KELURAHAN PAJAGALAN	-	1.202.843.000	
	- Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan Pajagalan	-	75.480.000	
	- Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Pajagalan	-	811.012.000	
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajagalan	-	316.351.000	
3.5.	PENGAWASAN	4.091.430.450	4.655.430.450	
3.5.1.	INSPEKTORAT	4.091.430.450	4.655.430.450	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.265.225.200	2.335.669.700	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	443.156.000	443.156.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.579.000	17.579.000	
	- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.365.470.250	1.859.025.750	
3.6.	PERENCANAAN	4.784.221.776	5.167.144.276	
3.6.1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.784.221.776	5.167.144.276	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.222.049.000	1.424.699.000	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	65.500.000	65.500.000	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.464.000	150.606.500	
	- Perencanaan Pembangunan Daerah	782.771.276	965.171.276	
	- Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.955.000	306.535.000	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		(A)	(B)		
	- Program Peningkatan, Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	854.976.500		1.045.479.000	
	- Program Administrasi Perbendaharaan Daerah	812.503.000		768.318.000	
	- Program Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	787.713.601		787.713.601	
	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran	848.715.000		1.117.895.000	
	- Program Penatausahaan dan Tata Kelola Administrasi Aset	2.223.958.000		2.166.758.000	
3.8.	KEPEGAWAIAN	6.968.077.290		11.217.363.290	
3.8.1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.968.077.290		11.217.363.290	
	- Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	1.518.650.690		1.518.650.690	
	- Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.332.000		20.332.000	
	- Program Pelayanan Informasi Data Kepegawain	716.845.900		1.011.929.900	
	- Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	1.325.346.500		1.750.886.500	
	- Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN	18.123.500		3.524.785.500	
	- Program Peningkatan disiplin ASN	3.386.778.700		3.386.778.700	
3.9.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	882.717.000		2.901.319.900	
3.9.1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	882.717.000		2.901.319.900	
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0		2.018.602.900	
	- Program Pengembangan Kompetensi SDM	882.717.000		882.717.000	
3.10.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	485.007.500		585.607.500,00	
3.10.1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	485.007.500		585.607.500,00	
	- Penelitian dan Pengembangan Daerah	485.007.500		585.607.500,00	
JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG		1.035.061.966.369		1.263.404.377.245	

